

ISSN 1410 - 3877

Buletin

H a b a

Mozaiik Kota

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

2009

51

H a b a

Informasi Kesejarahan
dan Kenilaitradisional

No. 51 Th. IX
Edisi April – Juni 2009

PELINDUNG

Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film
Direktur Tradisi
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

DEWAN REDAKSI

Rusjdi Ali Muhammad
Rusdi Sufi
Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Titit Lestari
Cut Zahrina
Essi Hermaliza

SEKRETARIAT

Kasubag Tata Usaha
Bendaharawan
Yulhanis
Ratih Ramadhani
Razali

ALAMAT REDAKSI

Jl. Tuanku. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226-24216 Fax. (0651) 23226
Email : bpsnt-bandaceh@yahoo.com
Website : www.bpsnt-bandaceh.com

Diterbitkan oleh :
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai
Tradisional Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh dari pembaca 4-8 halaman diketik 2
spasi, roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga
menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan
dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi
yang dimuat akan menerima imbalan sepiasnya.

ISSN : 1410 – 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info Budaya

Sambal Tinuktuk

Wacana

- Sudirman Beberapa Potret Lingkungan Kota
Banda Aceh Tempo Dulu
- Agus Budi Wibowo Banda Aceh yang Kosmopolitan pada
Abad 16-17
- Cut Nursaniah Konsep Pengembangan Kota Suka
Makmue Menjadi Kota Pemerintahan
Kabupaten Nagan Raya
- Elysa Wulandari Membangun Rantai Sejarah sebagai
Pembentuk Citra Kota Banda Aceh
Pasca Tsunami (Kajian Bangunan
Museum Tsunami)
- Titit Lestari Perluasan Ibukota Provinsi NAD:
Perluakah
- Agung Suryo Banda Aceh Kota Ruko: Reproduksi
Setyantoro Budaya Massa
- Ruksana dan Sri Peran Serta Masyarakat dalam
Waryanti Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Pustaka

Makanan Tradisional Melayu di Sumatera Utara

Cerita

Raja Ganje

Cover

Foto Udara Kota Banda Aceh

Tema Haba No. 52 Ekonomi Kreatif

PENGANTAR

Redaksi

Kota adalah bagian integral dari dinamika masyarakat. Cerminan budaya sebuah bangsa dapat dilihat dari perkembangan kotanya. Saat ini kota mendapat perhatian lebih dari pemerintah maupun masyarakat karena kondisi kota yang selalu dinamis dan menimbulkan berbagai gejala budaya baru akibat perkembangannya. Perkembangan kota tidak terlepas dari perkembangan masyarakatnya. Dalam edisi kali ini Haba mengetengahkan tema tentang Mozaik Kota yang diharapkan akan memberikan informasi lebih kepada pembaca tentang kota dari berbagai perspektif.

Sepanjang perjalanannya kota-kota yang ada di Aceh dan Sumatera Utara mengalami perkembangan menjadi semakin besar dan ada juga yang menjadi semakin pudar. Perkembangan kota menjadi semakin besar atau semakin pudar disebabkan oleh berbagai sektor pembentuk kota yang saling terintegrasi dan menghasilkan sebuah budaya kekotaan yang membedakannya dengan daerah lain. Kota ibarat makhluk hidup, dia akan bertahan hidup jika dia dapat berkembang, jika dia tidak sanggup berkembang maka dia akan mati. Jika kita mendengar kata “kota” maka yang ada dalam bayangan adalah situasi yang ramai, kumuh, warna-warni, glamour, rawan, sibuk dan sebagainya. Mozaik-mozaik inilah yang sebenarnya menjadikan sebuah kota menjadi dinamis. Keberadaan mozaik-mozaik yang berlawanan (kaya-miskin, kumuh-terawat, dll) dapat hidup berdampingan dan saling berjalan pada koridornya hanya dapat kita temukan dalam sebuah “kota”.

Diharapkan tulisan-tulisan yang kami sajikan dalam Haba No. 51 tahun 2009 ini mampu memperkaya khasanah pengetahuan bagi pembaca tentang gambaran sebuah kota dari berbagai sudut pandang. (TL)

Redaksi

Makanan Tradisional Batak Sambal Tinuktuk

Tinuktuk adalah sejenis sambal khas Batak Simalungun. Saat ini sulit menemukan makanan khas tersebut baik di pasar tradisional maupun di rumah makan khas Batak. Kelangkaan ini disebabkan karena cara pembuatannya yang sedikit rumit sehingga orang malas untuk membuatnya. Di samping bahannya, takaran dan cara pembuatannya harus secara tradisional jika menginginkan kualitas sambal yang enak dan tahan lama. Bahan-bahannya terdiri dari sejumlah jenis rempah-rempah yang diolah sedemikian rupa. Rasanya gurih, pedas, panas dan sebagaimana sambal pada umumnya, ia cocok untuk menambah nafsu makan. Sambal Tinuktuk lebih enak dimakan dicampur dengan ikan mas, mujahir, nila bakar. Dalam masakan khas Batak dikenal dengan Tinombur. Sambal Tinuktuk disiram dengan air panas dan dilumuri pada ikan bakar atau daging. Sambal tinuktuk sangat enak dinikmati dalam suasana udara dingin. Sambal Tinuktuk ini cukup menarik selera makan dan membuat lidah bergetar.

Makanan ini adalah makanan yang hampir selalu muncul pada orang yang baru melahirkan. Pada saat orang menjenguk ke rumah dan disuguhi makan siang atau malam maka pemandangan yang jamak adalah di depan sang ibu yang baru melahirkan ada botol yang berisi tinuktuk. Sambal tinuktuk itu menjadi menu wajib bagi ibu yang melahirkan, bersama sayuran bernama bangun-bangun. Sambal ini bahkan tidak pernah jauh dari jangkauan ibu yang baru

melahirkan bahkan kadang-kadang kerap diletakkan di sebelah tempat tidur ibu yang baru melahirkan.

Tinuktuk menjadi menu wajib bagi para ibu yang baru melahirkan karena dianggap mempunyai khasiat seperti halnya jamu. Jamu yang dimaksud adalah jamu yang berbahan alami tanpa bahan kimia sehingga lebih menyehatkan dan cocok bagi wanita yang baru melahirkan. Makanan ini berkhasiat sebagai penambah nafsu makan, menghangatkan badan dan dapat menambah daya tahan tubuh bagi ibu yang menyusui.

Selain khasiatnya untuk kesehatan, tinuktuk menjadi populer terutama karena kepraktisannya. Makanan ini awet dan tidak basi dalam waktu berminggu-minggu. Pada zaman dahulu, tinuktuk ini mempunyai tempat yang khas yaitu dimasukkan dalam tabung yang terbuat dari bambu. Pada saat sekarang sudah jarang orang menggunakan tabung bambu tetapi tinuktuk dimasukkan ke dalam botol besar, seukuran botol kecap. Botol itu diisi sampai penuh. Karena sambal tinuktuk berbentuk semi-padat, maka untuk mengambilnya biasanya ada semacam alat tusuk yang terbuat dari lidi. Lidi ini berguna untuk melempangkan jalan tinuktuk sewaktu botol itu kita miringkan ke piring agar tinuktuknya jatuh ke piring tersebut.

Sumber:

www.mysarimatondang.blogspot.com
www.simalungun.net

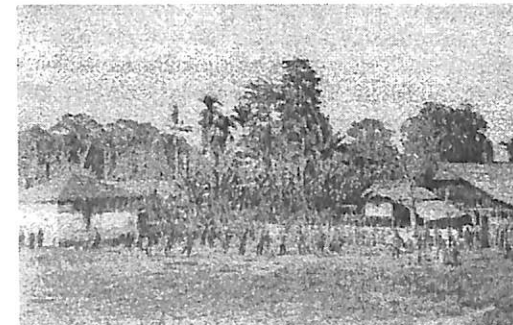
Beberapa Potret Lingkungan Kota Banda Aceh Tempo Dulu

Oleh: Sudirman, SS

Pendahuluan

Untuk memahami masa lalu dapat dilakukan melalui berbagai sumber, baik itu sumber tertulis dan lisan maupun yang tidak tertulis dan lisan seperti foto dan bangunan. Foto dapat digunakan untuk membantu memahami masa lalu karena foto dapat memantulkan beberapa segi atau aktivitas manusia di masa lampau. Untuk itu, tulisan singkat ini berusaha memahami infrastruktur dan penduduk Kota Banda Aceh melalui sumber foto.

Narasi Foto



Komplek istana Sultan Mahmudsyah¹

Foto itu menunjukkan mengapa Belanda tidak berhasil menemukan Istana Aceh pada pendaratan pertama, yaitu karena istana tertutup dengan semak-semak belukar,² keadaan bangunan tidak terawat, istana terbuat dari kayu dan beratap ijuk, keraton dikelilingi rawa-rawa, tanah kosong, dan tanah kuburan. Keadaan ini sangat

berbeda dengan kisah-kisah yang diterima orang Eropa mengenai keagungan Kerajaan Aceh pada abad ke-17.



Komplek istana tampak dari kejauhan³

Sultan Iskandar Thani (1637-1641), misalnya, menyampaikan catatan harta kekayaannya yang ditulis di atas kertas penuh hiasan kepada Stadhouder Frederik Hendrik, yang berisi rincian mengenai tambang emas, gajah, kuda, tukang, dan bawahan yang dimilikinya.⁴

Menurut Lee,⁵ kemunduran Aceh dimulai ketika pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang umumnya lebih banyak digambarkan sebagai pencipta "zaman keemasan" Aceh. Lee mengajukan argumentasi bahwa perang-perang yang dilancarkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk ekspansi sangat menguras ekonomi Aceh terutama untuk biaya perlengkapan 19.000 prajurit untuk melakukan serangan dan

¹ Koleksi KITLV 19242

² Annabel The Gallop, "Musings on a piece of 'wallpaper': Some thoughts on early royal letters from Aceh", *International Workshop on Malay Manuscripts*. (Leiden University Library, 16-18 Maret, 1998) hlm. 9

³ Lee Kam Hing, *The Sultanate of Aceh: Relation with the British 1760-1824*. (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1995) hlm. 15.

¹ Koleksi KITLV # 19261

² E. B. Kielstra, *Beschrijving van den Atjeh-Oorlog met gebruikmaking der officieele bronnen, door het Departement van Kolonien daartoe afgestaan*. Vol. I. ('s-Gravenhage : De gebroeders van Cleef, 1883) hlm. 262.

Wacana

mengepung Portugis di Melaka pada 1629, dan biaya lain untuk memperoleh kapal, perbekalan dan senjata.

Djajadiningrat mengemukakan tentang kebakaran besar yang menghancurkan sebagian besar harta kekayaan kerajaan pada masa pemerintahan Sultanah Naqiyat al-Din Nur al-Alam (1675-1678)⁶ sebagai faktor yang turut menyumbang hilangnya harta kekayaan dan kekuasaan raja. Akan tetapi faktor utama menurut Djajadiningrat yang menyebabkan kemunduran Aceh karena diperintah oleh raja perempuan selama setengah abad, mulai tahun 1641.



Komplek kediaman gubernur Belanda di Kutaraja (1877)⁷

Foto di atas menunjukkan rumah kediaman gubernur Belanda di Kutaraja (Banda Aceh), diambil pada tahun 1877. Foto itu menggambarkan betapa cepat Belanda membawa bahan bangunan, tukang, dan pentingnya pernyataan-pernyataan simbolis untuk menegaskan keinginan dalam memberikan karakter lokal dan "oriental" kepada tempat gubernur.

⁶ R. Hoessein Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh : Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh berdasarkan bahan-bahan yang terdapat dalam karya Melayu*. (Banda Aceh : Proyek Pengembangan Permuseuman, (terjemah Teuku Hamid), 1982/1983) hlm. 57-58.

⁷Koleksi KITLV #2987



Kediaman gubernur Belanda di Kutaraja (1877)⁸

Foto ini menunjukkan kuda dan kereta kuda gubernur dipajang di halaman depan kediaman itu. Pada foto di atas ini tampak *rotunda* yang didirikan di tanah bekas istana raja untuk tempat musisi bermain musik pada waktu perayaan-perayaan resmi.



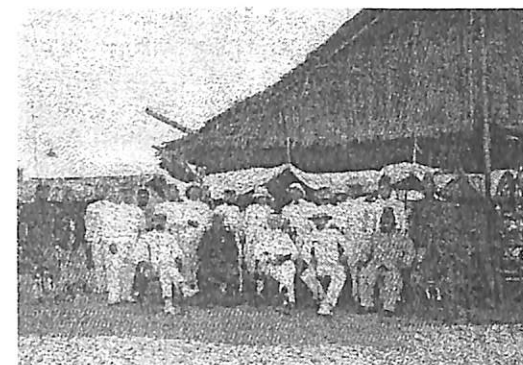
Seorang controleur Belanda di Krueng Raba (Aceh Besar) bersama sejumlah orang Aceh dan Teuku Lampasei, uleebalang Peuet Moekim (1877)⁹

Foto para kepala *gampong* Aceh yang telah pindah sekutu dan dikukuhkan dalam jabatan masing-masing oleh pemerintah Belanda. Untuk menandai status mereka, pejabat Aceh tertua dan pejabat Belanda duduk di kursi yang dibawa ke luar tempat berfoto; para anak buah berdiri di belakang mereka. Pilihan suatu tempat di luar untuk foto bersama, tanpa tanda-tanda pengenalan lokasi di latar belakang, menunjukkan bahwa

⁸Koleksi KITLV #2988

⁹ Koleksi KITLV 3508

administrasi belum berakar di Aceh pada waktu itu.



Para pejabat Belanda dan Aceh¹⁰

Pada foto di atas dapat dipahami bahwa Belanda tidak membawa payung (kebesaran) bersama mereka dari Jawa. Lambang status dari Jawa itu yang dicontoh dan juga menjadi lambang kekuasaan kolonial dan merupakan tanda yang sangat menonjol dalam foto-foto pejabat Belanda dan pejabat bumi putra di Jawa. Hal itu tidak ada dalam foto mengenai Aceh, seperti halnya yang terlihat pada gambar di atas yang diambil pada bulan Mei 1910.



Artilleri KNIL dekat kediaman sultan Aceh (1874)¹¹

Penjajahan Belanda banyak memakai dan membawa orang dari pulau-pulau lain di Nusantara ke Aceh. Sebagian besar serdadu yang bertugas di Aceh adalah orang Nusantara dari Jawa, Madura, Ambon, dan

¹⁰ Koleksi KITLV # 5951

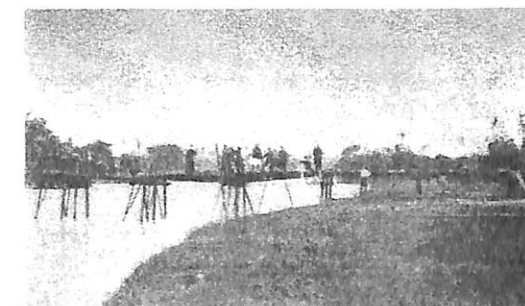
¹¹Koleksi #19278

Wacana

Manado. Pada pasukan invasi kedua, pasukan terdiri atas 180 serdadu berbedil asal Afrika Barat, (sekitar 3.000 orang Afrika Barat bekerja sebagai serdadu KNIL selama peperangan di Aceh. Mereka dibeli di pangkalan Belanda di Elmina (sekarang Ghana),¹² jumlah serdadu dari Eropa paling banyak pada tahun-tahun pertama pertempuran. Pada tahun 1873 orang Eropa seluruhnya berjumlah 1.000 dari 3.000 serdadu, pada tahun 1910 serdadu Eropa masih berjumlah 1.000, tetapi serdadu dari Nusantara berjumlah 5.000.¹³

Pasukan pada invasi pertama juga membawa serta 220 perempuan asal Jawa dan Ambon, dan 300 pelayan para perwira¹⁴ pada invasi kedua sebanyak 243 perempuan menyertai pasukan.¹⁵

Foto di atas menunjukkan bahwa pasukan artileri KNIL dekat gerbang kediaman sultan pada tahun 1874, di antara para serdadu itu tampak seorang perempuan Jawa yang dapat dikenali dari kebaya dan batiknya. Foto itu juga menunjukkan kondisi kehidupan sejumlah perempuan dalam barak-barak serdadu yang didatangkan untuk memberikan pelayanan domestik kepada para serdadu.



Jembatan sungai Aceh¹⁶

Foto di atas diambil sekitar tahun 1874, foto di bawah sekitar tahun 1895 dan foto di bawahnya lagi pada sekitar 1905

¹²Paul Van't Veer, *De Atjeh Oorlog*. (Amsterdam: Arbeiderspers, 1969) hlm. 118.

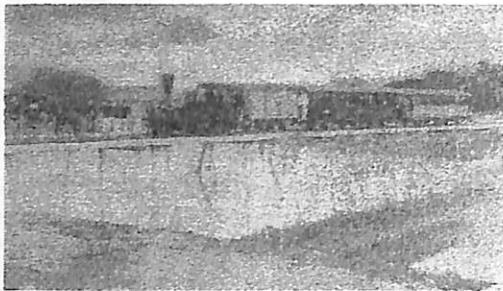
¹³Van't Veer, 1969, hlm. 234.

¹⁴Van't Veer, 1969, hlm. 51.

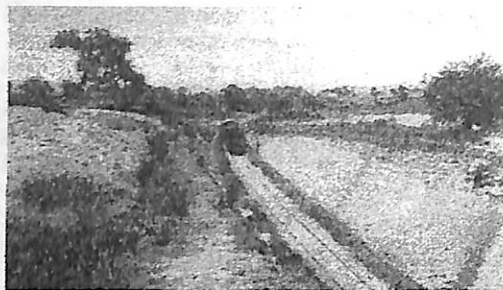
¹⁵Van't Veer hlm. 95.

¹⁶Koleksi KITLV # 19236

mengenai jalan kereta api dan gerbong-gerbong, hal itu berkaitan dengan sejarah militer dan pekerja orang Jawa di Aceh.



Kereta api sedang melintasi jembatan¹⁷



Jalan kereta api¹⁸

Jalan kereta api dan jembatan mewakili sebuah masukan tenaga kerja yang sangat besar. Orang-orang Jawa, menggunakan cangkul, menggali selokan-selokan yang dalam dan memindahkan tanah galian dengan keranjang; mereka merentangkan dan merawat jalan kereta api.



Pos jaga di garis pertahanan di Kutaraja¹⁹

¹⁷Koleksi KITLV # 27493

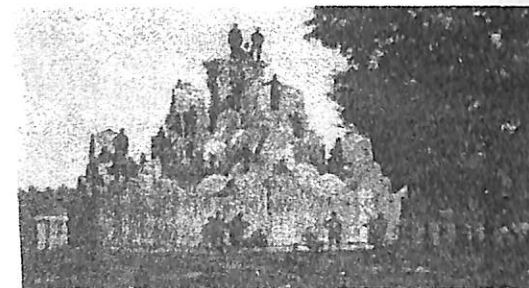
¹⁸Koleksi KITLV #43052

¹⁹Koleksi KITLV # 4917

Foto itu diambil pada tahun 1892, menunjukkan pos jaga di garis pertahanan yang mengawal Kutaraja, tampak orang Aceh dengan kereta kuda menunggu untuk diperiksa dan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Sebagian besar rakyat Aceh terperangkap dalam perang Belanda di Aceh sebagai orang sipil antara pemerintah kolonial yang berpusat di ibukota dan gerilya Aceh yang berpusat di bukit-bukit. Jalan-jalan dan jembatan-jembatan baru yang dibangun oleh kuli-kuli orang Jawa mempercepat gerak patroli-patroli KNIL, namun jalan-jalan dan jembatan-jembatan itu juga digunakan rakyat Aceh untuk membawa barang dagangan mereka ke pasar dengan cepat dan lebih mudah.



Gunongan sekitar tahun 1874²⁰



Suasana sekitar gunongan setelah direnovasi oleh pemerintah Belanda²¹

Foto Gunongan pada tahun 1874 memperlihatkan daerah yang tidak terawat. Belakangan pemerintah kolonial Belanda memperbaiki Gunongan, mengecat putih, melengkapi dengan taman rumput yang hijau

²⁰ Koleksi # 19273

²¹ Koleksi KITLV #255572

di sekitarnya, dan menjadikannya sebagai lokasi pariwisata.

Jika ditelusuri kembali jejak-jejak sejarah Aceh masa lalu, dapatlah diketahui bahwa agama Islam masuk ke Aceh antara lain melalui pendakwah-pendakwah Arab. Sambil berniaga mereka memperkenalkan agama Islam yang ternyata diterima baik oleh penduduk setempat. Sedikit demi sedikit akhirnya agama Islam berkembang pesat di Aceh. Hal ini tidak terlepas dari sikap para pendakwah Arab yang arif dan bijaksana.

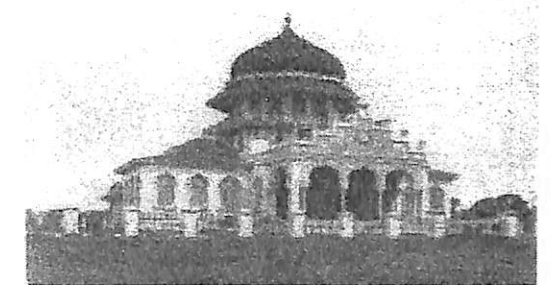


Komplek mesjid dan makam Sayyid Abu Bakar bin Husain bil-Faqih (Teungku Di Anjong)²²

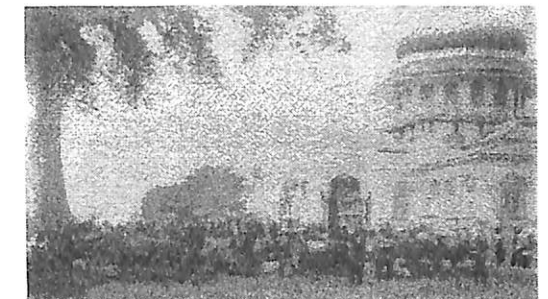
Mengenai peristiwa yang melatarbelakangi berdirinya bangunan Mesjid Teungku di Anjong dapat dikisahkan sebagai berikut. Ketika itu di Banda Aceh, tepatnya di Kelurahan Peulanggahan kedatangan seorang ulama kharismatik dari Hadramaut yang bernama Sayyid Abu Bakar bin Husain bil-Faqih, masyarakat Banda Aceh masih banyak yang menjalankan adat tradisi dan budaya yang menyimpang dari ajaran Islam.

Sebagai seorang ulama, beliau berusaha memberikan pengertian dan pengarahan kepada masyarakat yang akhirnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Beliau mendirikan tempat pengajian dan mesjid di kompleks tersebut sebagai salah satu sarana dakwahnya.

²² Koleksi # 4925



Mesjid Baiturrahman yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1879²³



Kegiatan dagang orang Aceh di sekitar Mesjid Baiturrahman (1892)²⁴

Mesjid Raya Baiturrahman hancur terbakar ketika Belanda berusaha menguasai lingkungan Istana Sultan Mahmud Syah. Serdadu artileri KNIL tidak berhasil menempatkan meriam untuk menghancurkan tembok-tembok istana karena pandangan mereka terhalang oleh pohon-pohon yang sangat rimbun di sekeliling istana. Karena itu mereka melepaskan tembakan-tembakan ke dinding dari tanah yang mengitari mesjid sekitar 300 meter jaraknya dari halaman depan istana.²⁵ Begitu berhasil menguasai ibukota Kerajaan Aceh, pemerintah kolonial Belanda menyisihkan dana untuk membangun kembali mesjid itu dengan menyewa seorang arsitek Italia untuk merancangnya. Mesjid Baiturrahman mulai dibangun pada tahun 1879 dan selesai pada

²³Koleksi KITLV #3392

²⁴Koleksi KITLV # 4913

²⁵Kielstra, 1883, hlm. 271, 293.

tahun 1881. Kemudian pada tahun 1936 ditambahkan tiga kubah lagi.



Kegiatan pasar masyarakat Aceh di Kutaraja²⁶

Pasar yang terdapat di dalam kota Bandar Aceh Darussalam hendaknya jangan diartikan sebagai pasar modern, melainkan masih sangat tradisional di mana penjual dan pembeli melakukan transaksi di tempat-tempat itu. Lokasi pasar kelihatannya kerap kali berubah sesuai dengan situasi politik dalam ibukota. Sebagai contoh pada masa permulaan pemerintahan Sultan Alaidin Jauhansyah (1735-1760), saingannya Sultan Jamal Alam Badr Al-Munir, menjadikan kampung Jawa sebagai pusat kegiatan

²⁶Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonial I*, (terj. Ng. Singarimbun, dkk.), Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985, pada bagian lampiran.

Sudirman, S.S. adalah tenaga Teknis pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

perniagaan.²⁷ Pejabat Kesultanan yang bertanggung jawab terhadap pelabuhan dan pasar disebut Syahbandar.

Penutup

Arsip visual dapat dijadikan sumber penting untuk memahami sejarah Aceh. Foto menawarkan ide-ide untuk menulis sejarah sosial yang lebih luas. Dari beberapa foto di atas dapat dipahami bahwa lingkungan fisik kota Banda Aceh sudah mulai tertata dengan baik. Hal itu berkaitan dengan masuknya pengaruh Belanda di Aceh, karena Belanda ingin menaklukkan Aceh dalam berbagai segi sehingga dilakukan penataan sedemikian rupa.

Budaya hidup dengan lingkungan yang bersih dan teratur seperti tercermin dalam beberapa foto di atas patut dicontoh untuk masa sekarang, apalagi Aceh yang sedang giat-giatnya menata keindahan dan kebersihan. Perilaku dan mental masyarakat juga sangat berpengaruh dalam menata lingkungan sehingga pembinaan perilaku dan mental masyarakat harus berjalan seimbang. Dengan laju pembangunan dalam berbagai sektor, terutama lingkungan.

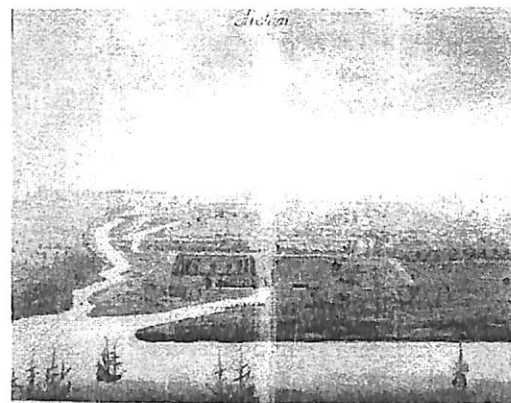
²⁷Menurut peta-peta ibukota yang dibuat oleh Belanda pada permulaan perang Aceh, lokasi Peukan Aceh terletak pada pertemuan Krueng Daroy dengan Krueng Aceh atau pada lokasi kantor C.P.M sekarang.

Banda Aceh Yang Kosmopolitan Pada Abad 16-17

Oleh : Agus Budi Wibowo

Pendahuluan

Banda Aceh yang telah berulang tahun ke-804 pada tanggal 22 April lalu merupakan ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan usia yang demikian, Banda Aceh merupakan salah kota tua yang ada di Republik Indonesia. Tentunya, perjalanan panjang yang diwarnai dengan pasang-surut telah dilalui kota ini sesuai dengan perkembangan zamannya.



Gambar 1: Pemandangan pelabuhan Aceh

Cikal bakal kota Banda Aceh dapat dirunut melalui *Hikayat Aceh* yang menyebutkan bahwa Sultan Syamsu Syah ingin menyatukan kerajaan Mahkota Alam dan Kerajaan Darul Kamal dengan cara pura-pura menjodohkan putranya Ali Muhyat Syah dengan putri kerajaan Darul Kamal. Peminangan ini dapat diterima oleh Sultan Muzaffar Syah putera Inayat Syah yang pada waktu itu memerintah Darul Kamal. Akan tetapi, hal ini tidak berlangsung mulus. Pada saat arakan-arakan mengantarkan mas kawin, pasukan Makota Alam menyembunyikan senjata-senjata perang. Setibanya di Darul Kamal pasukan Makota Alam melakukan serangan tiba-tiba terhadap

Darul Kamal. Pada pertempuran itu Sultan Sultan Muzaffar Syah gugur. Dengan demikian, Sultan Syamsu Syah dari Mahkota Alam memerintah kedua kerajaan.

Pada tahun 1516 Ali Mughayat Syah dinobatkan menjadi raja, menggantikan ayahnya Sultan Syamsu Syah. Ibukota kerajaan dipindahkan lagi ke Daruddunia (Banda Aceh sekarang). Sejak itu kedua kerajaan sudah dipersatukan. Nama kerajaan kemudian menjadi Kerajaan Aceh Darussalam dengan ibukotanya disebut juga dengan nama Bandar Aceh Darussalam¹. Sejak saat itu, terbentuk kota Banda Aceh di wilayah yang saat ini disebut Nanggroe Aceh Darussalam.

Aceh memiliki letak yang sangat strategis, yaitu berada di pintu gerbang masuk wilayah Indonesia bagian barat. Di daerah menuju Samudra Hindia akan melalui Selat Malaka, apalagi tatkala pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Pedagang yang sebelumnya berniaga di Malaka menyingkir ke Banda Aceh. Dengan demikian, sangat strategis, baik dari segi kemiliteran maupun dari segi perekonomian. Oleh karena itu, tidak mengherankan Aceh menjadi daerah terbuka dan menjadi tempat persinggahan kapal-kapal berbagai bangsa dalam aktivitas perdagangan. Selain Aceh sendiri telah menjalin kerjasama perdagangan dengan berbagai daerah di Semenanjung Malaya dan India.² Sekilas gambaran di atas menunjukkan posisi yang begitu penting

¹A. Hasjmy, "Sulthan Alaidin Johan Syah Pendiri Banda Aceh Darussalam", dalam *Kota Banda Aceh Hampir Seribu Tahun*. (Banda Aceh: Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh, 1988). Hlm. 68-69.

²Irwan Abdullah. 2007. "Potret Retak Komunalisme Aceh". *Makalah Bahan Perbincangan Masa Depan Aceh* di Aceh Institute tanggal 8 Juni 2007.

yang dimiliki oleh Aceh sejak zaman dahulu. Dengan posisi yang strategis tersebut suatu yang wajar bahwa dikatakan sejak zaman dahulu Aceh merupakan suatu daerah yang sangat kosmopolitan.

Kosmopolitan kota/negara adalah suatu kota/negara di mana masyarakat dari berbagai latar belakang bangsa hidup bersama dengan membawa pengaruh budaya masing-masing.³ Selain itu, terdapat definisi kosmopolitan yang menunjuk kepada suatu realita di mana aneka ragam agama, ras, dan bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi. Ambil misal kota New York, kota ini adalah kota kosmopolitan. Di kota ini terdapat orang Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Budha, bahkan atheis. Seakan seluruh penduduk dunia berada di kota ini. Namun interaksi positif antar penduduk ini, khususnya di bidang agama, sangat minimal, kalau pun ada.⁴ Tulisan ini membahas tentang sifat kosmopolitan dari Banda Aceh.

Kosmopolitanisme Kota Banda Aceh

Apabila kita ingin merunut sejarah keberadaan kota Banda Aceh atau kerajaan Aceh kita dapat melihat melalui catatan sejarah yang pernah dibuat oleh para pelaut yang pernah singgah di kota ini. Dalam catatan sejarah tertua dan yang pertama yang dibuat lebih banyak bercerita tentang mengenai kerajaan-kerajaan di Aceh karena tatkala catatan sejarah itu dibuat kota Banda Aceh belum terbentuk.

Catatan tertua dan pertama bersumber dari sejarah Cina. Dalam catatan sejarah Dinasti Liang (506-556 M), disebutkan adanya suatu kerajaan yang terletak di

Sumatera bagian utara pada abad ke-6 yang dinamakan *Po-li* dan beragama Buddha. Pada abad ke-13 teks-teks Cina (Zhao Rugua dalam bukunya *Zhufanzhi*) menyebutkan *Lanwuli* (*Lamuri*) di pantai timur Aceh. Dan pada tahun 1282 M, diketahui bahwa raja Samudera Pasai mengirim dua orang (Sulaiman dan Shamsudin) utusan ke negeri Cina. Dalam sumber yang lain (Ying Yai Sheng Lan), Ma Huan dalam pelayarannya bersama dengan Laksamana Cheng Ho, mencatat dengan lengkap mengenai kota-kota di Aceh seperti, *A-lu* (Aru), *Sumendala* (Samudera), dan *Lanwuli* (Lamuri). Dalam catatan *Dong Xi Yang Kao* (penelitian laut-laut timur dan barat) yang dikarang oleh Zhang Xie pada tahun 1618, mencatat secara terperinci mengenai Aceh yang telah modern⁵ Tampaknya, catatan-catatan tersebut belum menyebut kota Banda Aceh.

Selanjutnya, selain kota-kota tersebut di atas, Kota Pasai dan Perlak pernah masuk dalam catatan karena kedua kota ini juga pernah disinggahi oleh Marco Polo (abad ke-13) dan Ibnu Batuta (abad ke-14) dalam perjalanannya ke Cina. Barang dagangan utama yang paling terkenal dari Pasai adalah lada yang banyak diekspor ke Cina. Sebaliknya barang-barang dari Cina seperti sutera, keramik, dan lain-lain diimpor ke Pasai.

Pada abad ke-15, armada Cheng Ho juga mampir dalam pelayarannya ke Pasai dan memberikan lonceng besar yang tertanggal 1409 M (Cakra Donya)⁶ kepada raja Pasai. Selain pribumi di Kota Samudera Pasai banyak tinggal komunitas Cina. Mengenai keberadaan komunitas Cina di sana juga didapatkan dalam *Hikayat Raja-Raja Pasai*



Gambar 2: Lonceng Cakradonya yang berada di Komplek Museum Aceh

³Sri Hartati Samhadi. "Krisis Bayi di Korea Selatan". www.kompas.com

⁴Alwi Shibab. "Menyikapi Pluralisme Agama" http://www.freelists.org/post/ppi/ppi_india-Menyikapi-Pluralisme-Agama-12.

⁵<http://www.acehinstitute.org>, down-load Golden Horde, Hubungan Sejarah Aceh dan Tiongkok

⁶Lonceng Cakra Donya tersebut sekarang masih ada diletakkan didekat pintu masuk Museum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh

yang menyebutkan adanya "Kampung Cina". Jadi jauh sebelum kerajaan Aceh Darussalam berdiri (abad ke-16), komunitas Cina telah berada di Aceh sejak abad ke-13.⁷ Pada tahun 1524 Samudera Pasai ditaklukan oleh Sultan Ali Mughayat Syah dari Kerajaan Aceh Darussalam, dan sejak itu Samudra Pasai pudar pamornya.

Pada abad 16-17 Teluk Aceh dapat dimasuki melalui tiga terusan atau alur supaya berdekatan dari pulau-pulau yang dikelilingi gorong-gorong. Yang pertama disebut terusan "Surat" dipakai untuk menuju Gujarat, yang kedua disebut "Terusan Benggali" untuk menuju pantai timur India dan yang tidak bernama adalah dimaksud ke selat Malaka".

Gambaran lingkungan alam Banda Aceh dan sekitarnya, berdasarkan catatan-catatan dari Eropa menunjukkan bahwa lingkungan alam kota Banda Aceh pada abad 16 dan 17 tidaklah "ramah" terhadap para pelaut asing (Eropa). Ketidakramahan ini dialami oleh mereka ketika mereka akan memasuki pantai di sekitar Banda Aceh. Menurut catatan Tome Pires (1513) tertulis bahwa ia mengalami suatu yang tidak menyenangkan ketika akan memasuki Banda Aceh. Selanjutnya, dikatakan bahwa walaupun kota Banda Aceh dikelilingi oleh Pulau Gomes (Ganispol, yang maksudnya adalah pulau dihadapan pelabuhan Aceh), tetapi tidaklah mudah untuk masuk ke Bandar sebab kalau tidak hati-hati kapal dapat kandas. Hal yang sama dialami oleh Graf (1640-1650) yang menulis catatan pengalamannya sebagai berikut,

"Kami berlayar menyusuri pantai barat Sumatra dan nyaris kandas pada karang-karang Pulo Weh, dan seandainya laut pada waktu tidak tinggi, rasa-rasanya kami tidak bakal selamat".

Tidak jauh berbeda dengan dua pelaut yang disebutkan tersebut, Laksamana Perancis Beaulieu ketika hendak berlabuh di kota Banda Aceh memerlukan waktu delapan hari

sebelum benar-benar berlabuh padahal untuk itu jaraknya hanya tinggal 4 mil dari tempat kapalnya berhenti dan menjatuhkan jangkarnya untuk berapung. Ketika hendak masuk ke Banda Aceh melalui sungai, ia masih disambut oleh angin yang bertiup dari haluan sampai ia kehilangan jangkar. Pada bulan April 1637 Peter Mundy juga dengan susah payah mencapai tempat berlabuh: "*Wee gott into Achein, being hindred until now by currants and contrary winds, getting little these 2 or 3 days*".⁸

Walaupun jalan menuju Banda Aceh tidak ramah dan menjadi benteng alam, namun kondisi kota Banda Aceh terletak di dataran rendah yang subur sekelilingnya dan dilingkari oleh perbukitan. Marsden melukiskan kota Banda Aceh pada saat itu dengan mengatakan bahwa, "...*the town is situated on plain in a wide valley formed like an amphitheatre by lofty range of hills*, sedangkan Anderson mengatakan bahwa "*The country above the town is highly cultivated and abounds with small villages*".⁹

Setelah Sultan Ali Mughayatsyah berkuasa di Kerajaan Aceh, ia membangun basis kekuasaannya di kota Banda Aceh dan melibatkan kota ini langsung ke dalam arus perniagaan internasional. Walaupun tidak sesibuk Pidie dan Pasai, tetapi kapal yang digunakan dan komoditi yang diperdagangkan cukup banyak dan melimpah. Mengenai hal ini Tome Pires pernah mengatakan bahwa

"Sultan terlibat dalam perniagaan dengan memiliki kapal (*lanchara*) sebanyak 40 buah. Komoditi yang diperdagangkan adalah berupa bahan makanan, beras, dan rempah-rempah. Walaupun daerah hiterland Banda Aceh telah menghasilkan lada, akan tetapi produksinya lebih rendah dari apa yang dihasilkan di daerah Pidie".

⁸Denys Lombard. *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). Hlm. 55.

⁹*Ibid.*

Banda Aceh menjadi semakin berkembang ketika sultan Aceh berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan otonom yang telah ada di kedua sisi pantai Sumatra, yaitu Daya, Singkel, Barus, Tikus, Pariaman, Lamuri, Pidie, Pasei, Peureulak, Aru, Deli Siak, bahkan Johor atau Pahang. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang kaya sumber daya komoditi pertanian/hutan dan bahan mineral. Karena potensi daerah pedalaman yang terbatas untuk menunjang kebutuhan ibukota kerajaan dan sebagai sumber pemasukan dan pembiayaan istana, maka sultan kemudian memberlakukan serangkaian kebijakan yang bersifat pembatasan daerah takluk dengan dunia keluar dan sekaligus memaksa kapal-kapal asing untuk berhubungan dengan ibukota (Banda Aceh).

Kebijakan tersebut membawa dampak bahwa Bandar Aceh Darussalam (Banda Aceh-sekarang) tumbuh menjadi kota perniagaan yang ramai. Banyak pedagang asing singgah dan menetap, diantaranya dari Arab, Persia, Pegu, Gujarat, Jawa, Turki, Bengali, Tionghoa, Siam, Eropa dan lain-lain. Kota ini tumbuh menjadi sebuah kota kosmopolitan yang berkarakter multietnis. John Davis of Sandridge¹⁰, yang bekerja untuk sebuah kapal Belanda di bawah pimpinan de Houtman bersaudara (Cornelis dan Frederick) berada di Aceh pada 1598 (ketika Aceh berada di bawah Sultan Alaudin Riayat Syah Al-Mukammil (1589-1604)) menulis kesan-kesannya tentang keberadaan orang asing dan perdagangan di Aceh dengan mengatakan bahwa,

"The one and twentieth (June 1599) we anchored in the Bay of Achin, in twelve fathome. Being here, the King sent hos Officers to measure the length and breadth of our ships, to take the number of our Men and Ordnance, which they

¹⁰Fachry Ali. "Satu Aceh Beragam Sejarah Sebuah Refleksi Pasca Konflik". Makalah yang disampaikan dalam Seminar Kebudayaan Aceh dalam Rangka HUT Ke-20 Serambi Indonesia di Aula Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh tanggal 23 Maret 2009.

did. With those Officers, our Baase (Dutch baas, boss) sent two of his people with Present to the King, a Looking-glasse, a Drinking-glasse, and Bracelet of Corall. The one and twentieth, our men came aboard, whome the King had apparelled after his Countrey manner, in white Calicut cloth: they brought newes of peace, Welcome and plenty of Scicery. We found foure Banks riding the Bay, three of Arabia, and of Pegu, that came to lade Pepper. Here was also a Portugall, named Don Alfonso Vincent, that came with foure Barkes from Malacca, to prevent our trade (Ali, 2008: 4)

(Tanggal 21 (Juni 1599) kami bersauh di pantai Aceh, sedalam dua belas depa. Raja mengirim pejabatnya untuk mengukur panjang dan luasnya kapal-kapal kami, menghitung jumlah anggota kami dan peralatan militer. Bersama dengan pejabat-pejabat itu, pemimpin kami mengirim dua anggotannya dengan (membawa) hadiah-hadiah kepada raja, sebuah cermin dan gelas, serta gelang batu. Pada tanggal 21 kami mendarat dimana raja telah berdandan khas daerah dalam pakaian putih Kalikut: mereka menyampaikan berita perdamaian, keramah-tamahan, dan sekian banyak rempah-rempah. Kami melihat empat barks (kapal, tongkang ?) yang berlayar di pantai, tiga milik orang Arab dan satunya lagi milik orang Pegu, yang datang untuk memuat lada. Juga orang Portugas, bernama Don Alfonso Vincent, yang datang dengan empat barks dari Malaka, untuk merintangai perdagangan kami).

Tiga tahun kemudian Sir James Lancaster¹¹ juga mengunjungi kota ini, melukiskan kesan-kesannya dengan mengatakan bahwa,

¹¹Sufi, Rusdi dan Agus Budi Wibowo. *Jelajah Aceh Guide Book to Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004).

"... in the roade of Achem, some two miles of the city; where we found eighteen saile of shippes of divers nations, some goserats, some of Benggala some of Calicut (called Malabares), some Pegues, and some Patanyes, which came to trade there"

("... dalam perjalanan menuju Aceh, kira-kira dua mil dari kota, kita melihat 18 pelaut dari kapal-kapal niaga dari bermacam-macam bangsa, beberapa dari Gujarat, beberapa dari Benggala, beberapa dari Kalikut (disebut juga Malabar), beberapa dari Pegue, beberapa dari Pataya, yang datang untuk berdagang di sana").

Sedangkan dalam *Hikayat Malem Dagang*, kondisi Banda Aceh digambar dengan kata-kata sebagai berikut,

"Bak masa nyan (Iskandar Muda) rame pi that, peu nyan hajat dum halena. Nanggroe pi luah, banda pi rame han meu ne/ne keunan teuka. Padum-padum kapay di Kleng jime bakong beusoe meulila. Padum kapay Meulabari ngon Geujarati ngon Beunggala... Padum kapay na yang me tjawan, krikay, dulang, pingan raya. Padum-padum kapay di Keudah,- idja mirah meuneukat jiba, tunong baroh, timu barat, dempeu alat pi na jiba. Di Atjeh kon troih u barat, meuceuhu that po meukuta"

Pasar adalah sebuah tempat bertransaksi dan salah satu pusat keramaian. Adanya pasar dapat menarik bangsa-bangsa lain untuk datang ke Aceh. Apalagi Malaka sebagai salah satu pusat perdagangan di selat Malaka dikuasai oleh Portugis. Banda Aceh yang saat itu menggantikan posisi Malaka menjadi semakin ramai. Menurut Dampier, kota itu rumahnya 7 atau 8000. "Achin kelilingnya kira-kira 2 mil", kata de Graff. Pasar, seperti yang disebut Davis, berupa lapangan besar yang setiap hari menjadi pasar segala macam barang dagangan. Yang dilihat Graff hanya tinggal dua lapangan

besar untuk mengadakan pasar, yang satu "di tengah-tengah kota" dan yang lain "di ujung atas" (hulu sungai ?). Di tempat itulah para pedagang, baik yang muslim maupun yang menyembah berhala, dengan segala macam dagangannya. Peter Mundy memberitakan bahwa ada yang menjual telur penyu rebus. Warung mereka masing-masing dipungut bea sekeping emas sebulan untuk orang kaya Sri Maharaja¹². Dalam hal ini, John Davis¹³ juga menggambarkan keadaan kota Banda Aceh dengan mengatakan,

"the citie of Achin, if it may be so called, is very spacious, built in wood, so that we could not see a house till we were upon it. Neither could we go into any place, but wee found houses, and great councourse of people: so that I thinke the town spreadeth over the whole land... I saw three great market places, which are everdy frequented as faires with all kindes of merchandize to sell".

(Kota Aceh, jika boleh disebutkan kota, yang dibangun di tengah hutan, sangat luas, hingga kita tak bisa melihat rumah kecuali telah berada di sana. Kemana pun pergi, kita temukan rumah-rumah dan kerumunan orang hingga saya kira kota tersebut meluas ke seluruh negeri... saya melihat tiga pasar besar yang dikunjungi orang setiap hari dengan seluruh jenis barang dagangan untuk dijual).

Selain pasar, pusat kegiatan umum yang menghidupkan denyut jantung kota adalah masjid. Pada masa Iskandar Muda berkuasa, masjid selalu dibangun dalam jumlah besar. Bahkan Masjid Bait ur Rahman pernah dipugar dan diperbesar pada tahun 1614. Akan tetapi, sangat disayangkan, pada masa pemerintahan Sultan Nurul Alam

¹²Hasan Muarif Ambary. "Banda Aceh sebagai Pusat Kebudayaan dan Tamaddun", dalam *Kota Banda Aceh Hampir Seribu Tahun*. (Banda Aceh: Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh, 1988). Hlm. 91-92.

¹³Fachry Ali, *op.cit.*, hlm. 7.

(1675-1678) terbakar. Namun demikian, sebelumnya Peter Mundi (1673) pernah membuat dokumentasi bagaimana bentuk masjid tersebut.

Untuk menunjang aktivitas perdagangan, Banda Aceh pada zamannya, sultan selalu memperhatikan pekerjaan bangunan kota dan berusaha supaya jumlahnya cukup banyak untuk menampung pendatang baru yang tertarik oleh pengembangan kota besar. Menurut Beaulieu, Sultanlah yang memberi pengarahannya, dia sendiri yang menentukan bagaimana contoh gedung yang hanya mempunyai satu lantai dan dindingnya dari anyaman. Ia juga mengawasi supaya pembangunannya berlangsung secepat-cepatnya, dan budak-budak raja dipakainya dalam pekerjaan itu sibuk siang malam, "tanpa menyia-nyiakan terang cahaya bulan".

Akan tetapi, ada keluhan tentang masalah rumah ini bagi pelaut/penjelajah asing, yaitu harga tanah dan bangunan mahal. *"The ground and house cost almost one hundred pound sterling"*, kata James Lancaster. Sedangkan Beaulieu mempunyai pengalaman saat mencari rumah sewaan yang begitu tinggi meskipun menurutnya sudah menawar dengan harga tinggi pula,

"sesudah makan kami bersama-sama melihat rumah dekat rumah orang Inggris yang cukup nyaman. Tetapi, kapten pengawal, pemiliknya, minta seratus real setiap bulan; harga itu menurut saya terlalu tinggi, maka saya tak jadi menyewanya, meskipun saya sudah menawarkan 40 real sebulan".

Walaupun mahal, rumah-rumah itu sendiri sedikit sekali yang dibangun dengan batu. Graff memberi gambaran bahwa rumah-rumah dari alang-alang dan dari bambu... tetapi semuanya terdiri di atas tiang bambu setinggi 4 atau bahkan sampai 6 kaki (1,20 m - 1,80 m) di atas tanah larena pasang purnama dan sungai hampir setiap tahun menggenangi kota sehingga orang terpaksa

naik perahu dari rumah ke satu rumah lainnya¹⁴.

Kosmopolitanisme kota Banda Aceh pada abad 16-17 tampak pula pengelompokkan kampung berdasarkan pada asal pedagang dan bangsa asing. Menurut catatan Davis di kota ini terdapat Kampung Portugis, Gujarat, Arab, Benggali, Pegu, *"here are many of China that use trade, and have their particular towne, so have the Portugais, the Gusarates, the Arabinas, and those of Benggala and Pegu"*. Bahkan menurut Graff mereka yang menyembah berhalah seperti Hindu mempunyai *meru-meru* mereka sendiri. Kampung Cina dan Eropa malah berhimpitan dan ada kampung-kampung lain yang rumahnya lebih jauh letaknya. Pada umumnya rumah terbuat dari kayu, bambu dengan atap alang-alang.

Selain perkampungan, tata ruang kota, fasilitas kota, di Banda Aceh juga telah ditetapkan peradilan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Menurut Beaulieu, pada masa Sultan Iskandar Muda terdapat 4 peradilan, yaitu perdata, pidana, agama, dan niaga. Pengkhususan yang sedemikian tidak mengherankan dalam masyarakat sedemikian beragam dan kosmopolit. Peradilan perdata dilaksanakan setiap pagi, kecuali hari Jumat, di tempat balai peradilan yang letaknya dekat masjid Baiturrahman. Peradilan pidana juga bertempat di balai dekat balai perdata dan peradilan agama melaksanakan perkara-perkara khusus dengan tujuan menegakkan akhlak Islam bagi masyarakat Aceh, terutama dalam hal-hal berjudi, minuman keras, zinah dan sebagainya. Peradilan niaga dilakukan di balai yang terletak di dekat pelabuhan untuk menyelesaikan perselisihan antara pedagang, baik pedagang asing maupun pribumi. Peradilan niaga diketuai oleh Orang Kaya Laksamana yang kedudukannya sama dengan "walikota".¹⁵

Kondisi alam yang tidak ramah bagi pelaut ketika akan memasuki Banda Aceh dapat menjadi benteng pertahanan alam yang

tidak mudah masuk ke kota dari arah laut. Kesukaran-kesukaran tersebut merupakan jawaban mengapa kota tidak dilindungi oleh tembok kota untuk pertahanan dan secara sadar orang Aceh pun merasa tidak perlu tembok tersebut. Akan tetapi, gajah-gajah tempurilah sesungguhnya benteng kota.¹⁶ Jumlah binatang ini pada masa jaya kerajaan Aceh sekitar 900 ekor. Selain itu, kerajaan Aceh juga memiliki kapal layar dan kapal galley. Diantara kapal-kapal tersebut mempunyai ukuran yang melebihi ukuran kapal yang dibangun oleh orang Eropa. Sebagai penunjang pertempuran, kerajaan Aceh memiliki meriam. Menurut Beaulieu pernah mencatat di Banda Aceh terdapat 2000 pucuk meriam, terdiri atas 1200 meriam berkaliber sedang dan 800 meriam berkaliber besar.¹⁷

Penutup: Sebuah renungan

Seperangkat informasi yang dibahas tentang keberadaan kota berdasarkan pola perkampungan, struktur kota, pertahanan kota, kunjungan para pedagang/pelaut asing, dan peradilan menunjukkan bahwa Banda Aceh merupakan sebuah kota yang kosmopolitan yang ditunjang oleh sistem pemerintahan yang kuat. Selain itu, Banda Aceh yang kosmopolitan memberi makna bahwa kota ini telah menarik perhatian dunia luar dengan ekonomi dan perdagangan yang dikendalikan Aceh.

Sejarah merupakan sebuah proses yang akan dilalui oleh setiap manusia dan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Rusdi Sufi, "Peran Banda Aceh sebagai Pusat Perlawanan Kolonialisme dan Imperialisme di Kawasan Selat Malaka. Dalam dalam *Kota Banda Aceh Hampir Seribu Tahun*. (Banda Aceh, Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh, 1988). Hlm. 145-146.

Drs. Agus Budi Wibowo, M.Si. adalah tenaga Peneliti Madya pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

daerah di seluruh dunia. Banyak pelajaran yang dipetik dari sejarah ini. Demikian pula perjalanan awal terbentuknya kota, tumbuh kembang, dan kemunduran kota Banda Aceh, yang dialami pasca wafatnya Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Banda Aceh tidak lagi menjadi kota yang kosmopolitan. Kemunduran terus dialami hingga Indonesia merdeka bahkan makin terpuruk dialami ketika Aceh terjadi konflik Gerakan Aceh Merdeka dengan RI. Dari pembacaan sejarah yang panjang dialami Aceh/kota Banda Aceh, dalam sebuah seminar, Fachry Ali menyimpulkan hasil nyata adalah ayunan bandul yang silih berganti antara *eksteriorisasi* dan *interiorisasi*. Dalam perspektif budaya, hal ini dapat dianalogikan sebagai proses daur ulang budaya yang terjadi silih berganti, timbul-tenggelam.

Pasca gempa dan tsunami Banda Aceh menjadi pusat perhatian dunia. Banda Aceh menjadi kunjungan orang asing dari berbagai negara. Kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat Aceh menjadikan hilangnya perbedaan berbagai dikotomi, baik ras maupun bangsa. Mereka berbaur menjadi satu tekad membangun Aceh kembali. Kehadiran mereka, menjadikan Banda Aceh seperti kota kosmopolitan kembali, walau dalam bentuk lain. Moment ini hendaknya menjadi suatu awal kebangkitan pembangunan kembali Banda Aceh pasca konflik dan gempa/tsunami menuju kejayaan yang pernah dialaminya. Karena kota bukanlah organisme. Mereka tidak tumbuh atau berubah karena mereka sendiri. Kota tidak berkembang biak atau memperbaiki dirinya sendiri. Tujuan dan keinginan-keinginan manusia yang menjadikan sebuah kota terbentuk.

Konsep Pengembangan Suka Makmue Menjadi Kota Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya

Oleh: Cut Nursaniah

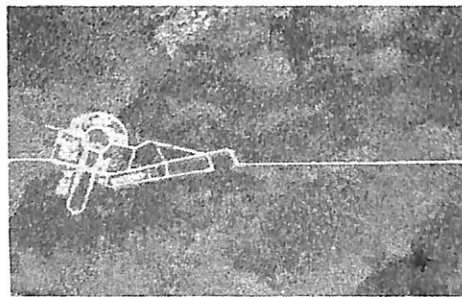
Pendahuluan

Nagan Raya merupakan kabupaten pemekaran dari Aceh Barat yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 04 Tahun 2002 dan diresmikan pada tanggal 2 Juli 2002, dengan Ibukotanya Suka Makmue. Suka Makmue dipersiapkan sebagai kota pemerintahan kabupaten, dan saat ini dalam proses berbenah melalui pembangunan berbagai infrastruktur yang akan menunjang fungsi kota. Kota sebagai pusat pemerintahan pada umumnya banyak dijumpai pada zaman sebelum revolusi industri. Selain sebagai pusat pemerintahan, kota-kota pada waktu itu berfungsi sebagai pusat-pusat politik.

Secara administrasi kota Suka Makmue terletak dalam Kecamatan Suka Makmue, dengan luas lahan lebih kurang 300 Ha. Kondisi lahan di kawasan tersebut relatif masih kosong dari infrastruktur dan penduduk. Baru sebagian kecil bangunan perkantoran setingkat kabupaten yang telah berdiri, sedangkan pusat kegiatan penunjang kota sama sekali belum ada. Kawasan perencanaan berupa hutan konversi, dikelilingi oleh rawa-rawa, sawah dan areal perkebunan kelapa sawit. Kawasan merupakan perbukitan dengan ketinggian 25-75 meter di atas permukaan laut dan lahan relatif datar dengan kemiringan 2,5%. Suka Makmue juga memiliki potensi lokasi yang cukup baik karena tingkat aksesibilitas yang tinggi ke kawasan tersebut dengan adanya prasarana jalan Ladia Galaska.

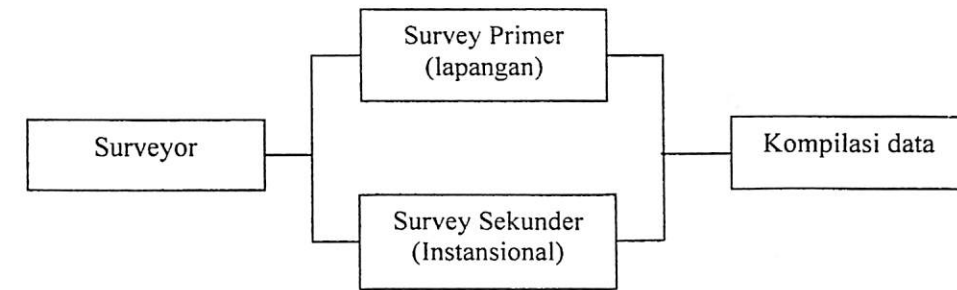
Untuk membangun Kota Suka Makmue dibutuhkan sebuah konsep perencanaan, yang berperan mengatur serta mengontrol pembentukan dan pertumbuhan ruang kota. Dengan demikian Kota Suka Makmue akan menjadi sebuah kota yang berkarakter sebagai kota pemerintahan. Pada

dasarnya kota terbentuk karena diikuti dengan kepadatan penduduknya. Namun dalam kasus Kota Suka Makmue, terlebih dahulu disediakan prasarana dan sarana bagi kebutuhan penduduk yang nantinya merupakan staf administrasi pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. Dengan hadirnya prasarana, sarana, dan fasilitas umum maka mulai lengkaplah daerah tersebut sebagai sebuah kota. Menurut Hariyono, (2007), semakin lengkap sarana dan fasilitas umum bagi kebutuhan masyarakatnya maka semakin besarlah kota itu, dan semakin profesional penggunaan sarana dan fasilitas umum maka semakin modernlah kota itu.



Gambar 1. Kondisi Eksisting Kota Suka Makmue

Dari fenomena di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa konsep yang relevan dengan kondisi lingkungannya, masyarakatnya dan karakter regionalnya yang akan menunjang terbentuknya sebuah kota pemerintahan.



Gambar 2. Skema Pelaksanaan Pengumpulan Data

Metode Kajian

Secara substansial landasan yang digunakan adalah Rencana Penataan kawasan kota pemerintahan sebagai ibukota kabupaten, terutama yang terkait dengan perkembangan terakhir yang terjadi di lapangan. Kemudian dibuat alternatif usulan Pedoman Penataan ruang kota. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam merumuskan rencana penataan ruang Kota Suka Makmue ini adalah: 1). Pendekatan fisik bangunan, dimana elemen-elemen ruang akan dibangun dan dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang berlangsung di kawasan tersebut dengan memperhatikan iklim dan kondisi lahan serta aspek lain yang sesuai dengan kaedah dan meminimalisir dampak terhadap bahaya bencana alam; 2). Pendekatan sosial budaya, dimana kebiasaan-kebiasaan dan karakteristik kehidupan masyarakat dapat terakomodasikan dengan baik melalui penyediaan dan pengadaan peruruan yang di rencanakan untuk kebutuhan di masa yang akan datang; 3). Pendekatan konsep *green city*, yang mana mempertimbangkan aspek makhluk selain manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan manusia. Selain itu memberikan keseimbangan lingkungan hidup yang tercipta kenyamanan, keselamatan dan kesehatan warga kota Suka Makmue; 4). Pendekatan peraturan - peraturan, ketentuan-ketentuan, dan perundang-undangan untuk mewujudkan pembangunan kawasan secara nyata. Jenis-jenis data yang

dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data tersebut masing-masingnya mempunyai metoda tertentu sesuai dengan kondisi dan materi yang disurvei. Survey primer merupakan observasi fisik, sedangkan survey sekunder adalah telusuran melalui instansi terkait serta literatur. Secara diagramatis metode pendataan dapat digambarkan sebagaimana gambar di atas.

Perolehan data tersebut selanjutnya dijabarkan dalam peta-peta skematik untuk memudahkan tahap analisis. Analisis data dilakukan dengan merujuk rencana penataan bangunan dan rencana kota lainnya dan dilakukan uji silang dengan kondisi aktual di lapangan. Hasil tersebut dipergunakan untuk membuat perencanaan dengan pendekatan-pendekatan yang kontekstual dan terkait dengan rencana-rencana pernah ada.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan informasi tentang kawasan perencanaan, maka dicaritemukan gagasan pengembangan kota Suka Makmue yang sesuai dengan kondisi lingkungannya, masyarakatnya dan karakter regionalnya. Kemudian dikembangkan konsep-konsep perencanaan dan perancangan Pusat kota Suka Makmue.

Hasil dan Pembahasan

Penataan pengembangan kota Suka Makmue akan mengikuti prinsip-prinsip: 1). *Green City*: untuk memberi kenyamanan kepada warga kota dan

mengantisipasi kerusakan kota; 2). *Urban Tourism*: bahwa kota Suka Makmue memiliki aset Budaya dan Alam yang dapat menjadi daya tarik wisata dan pada gilirannya akan memberi nilai tambah secara ekonomi kepada masyarakat; 3). Letak kegiatan pokok kota yang relatif berdekatan, yaitu pusat pemerintahan, ruang publik sebagai tempat masyarakat berinteraksi sosial, tempat beribadah, pasar modern sebagai tempat distribusi barang.

Gagasan pengembangan ruang Kota Suka Makmue sebagai berikut: 1). Sebagai pusat administrasi kabupaten; 2). Sebagai pusat permukiman perkotaan akibat fungsi kota sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena itu fasilitas ikutan yang terjadi adalah fasilitas pelayanan perdagangan dan jasa/komersial; 3). Sebagai pusat rekreasi air.

Adalah penting untuk menentukan jumlah penduduk yang akan menggunakan dan menempati kota ini, sehingga bisa diperkirakan kesesuaian kebutuhan fasilitas dan utilitas kota (sarana dan prasarana kota) baik secara kuantitas maupun kualitas, sebaiknya direncanakan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Jumlah penduduk diperkirakan berdasarkan luas lahan efektif dan dihitung menggunakan metode standar kebutuhan lahan minimum untuk hidup layak yaitu 0,01 hektar/jiwa atau 100 jiwa/hektar bagi penduduk perkotaan, yaitu 4800 jiwa. Dengan anggapan jumlah anggota dalam setiap keluarga adalah 5 orang, maka kota Suka Makmue bisa menampung 960 keluarga Pemda Kabupaten Nagan Raya.

Strategi penataan ruang kota

Penegasan pembedaan kawasan untuk menghindari pemanfaatan yang tidak tepat sesuai dengan karakter fisik lahan.

1. Pengembangan Kawasan Terbangun : Kawasan terbangun terdiri dari 5 pusat kegiatan, yaitu perkantoran, perdagangan, peribadatan, permukiman, dan ruang publik; Elemen fisik kota adalah bangunan masjid sebagai *landmark* kota, sehingga unsur estetika menjadi bagian penting dalam

merancang masjid; karakter perumahan berupa bangunan tunggal dalam kapling terbatas dengan pertumbuhan cenderung ke arah Timur. Proporsi pembagian rumah mengacu pada standar kebijakan nasional tentang distribusi perumahan 1: 3 : 6.

2. Pengembangan Kawasan Tidak Terbangun : Memanfaatkan kawasan hijau sepanjang daerah aliran sungai (Krueng Trang), kanal dan hutan kawasan rawa sebagai fasilitas ruang terbuka hijau, sehingga berfungsi efektif sebagai daerah tangkapan air guna penyediaan kualitas air tawar untuk penduduk kota, menjadikan kota lebih bersih dari pencemaran udara serta untuk menjadikan kota yang sejuk, sehat dan nyaman; Mengatur garis sempadan sungai baik dalam perencanaan maupun implementasinya di lapangan; Mengatur fungsi/tata guna lahan di sepanjang alur sungai yang mendukung konservasi sungai; Penyediaan jalur hijau di kawasan kota berupa hutan kota, taman dan penghijauan jalan akan membantu penyediaan udara yang segar, bersih, sehat dan nyaman; Mengatur garis sempadan sungai baik dalam perencanaan maupun implementasinya di lapangan.

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota : Membangun sistem transportasi jalan raya (darat), seperti penyediaan terminal mini dan halte-halte pada lokasi strategis; Penyediaan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi lainnya seperti, pasar modern, pertokoan dan jasa perbankan; Pembangunan prasarana utilitas untuk menyehatkan lingkungan.

Konsep Pengembangan Kota Suka Makmue

1. Pengembangan Land Use

Penataan ruang Kota Suka Makmue perlu mempertimbangkan faktor keamanan terhadap bencana alam, faktor efisiensi pemanfaatan ruang dan infrastruktur yang mendukungnya, sehingga dapat menopang

kehidupan masyarakat secara lebih arif dan aman. konsep peruntukan lahan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu: fungsi, skala dan karakteristik bangunan, transportasi dan kapasitas infrastruktur, inter relasi dan fungsi yang ada di sekitarnya.

2. Tata Lansekap Kota

Pengembangan kota bernuansa islami tercermin pada adanya keselarasan antara nilai-nilai hablum minallah (masjid, meunasah), hablum minannas (ruang-ruang interaksi di taman kota, alun-alun, lapangan olahraga), dan hablum minallam (hutan lindung, hutan kota, kebun bibit, dan lain-lain).

Ruang terbuka dikembangkan untuk dapat berfungsi sosial (kawasan perumahan, taman dan plaza) dan berfungsi ekonomi (pasar) serta berfungsi sebagai penyangga lingkungan seperti pembukaan ruang terbuka pada jalur-jalur sirkulasi, serta berfungsi ekonomi dan rekreasi dengan mengembangkan kawasan bantaran sungai yang berkonsep waterfront.

3. Sirkulasi

Sirkulasi utama kawasan adalah jalan masuk utama dari Lueng Baro hingga ke bundaran menara dan Jalan yang membelah kota dari Utara – Selatan. Sedang untuk mengisi sirkulasi ke dalam kawasan maka terdapat 2 tipe hirarki jalan yaitu jalan skunder lingkungan dan jalan lingkungan.

Pola jalan di kawasan perencanaan menggunakan sistem grid karena secara ekonomis lebih efisien dalam mengakomodasi aktifitas kegiatan. Jalan-jalan arteri utama merupakan *linkage system* utama yang menghubungkan arus pergerakan lalu-lintas barang, jasa, dan manusia. Untuk daerah-daerah atau zona tertentu, seperti kawasan kantor pusat pemerintahan perlu dibedakan polanya berupa radial untuk menunjukkan *focal point* sebagai pusat pemerintahan daerah.

4. Utilitas

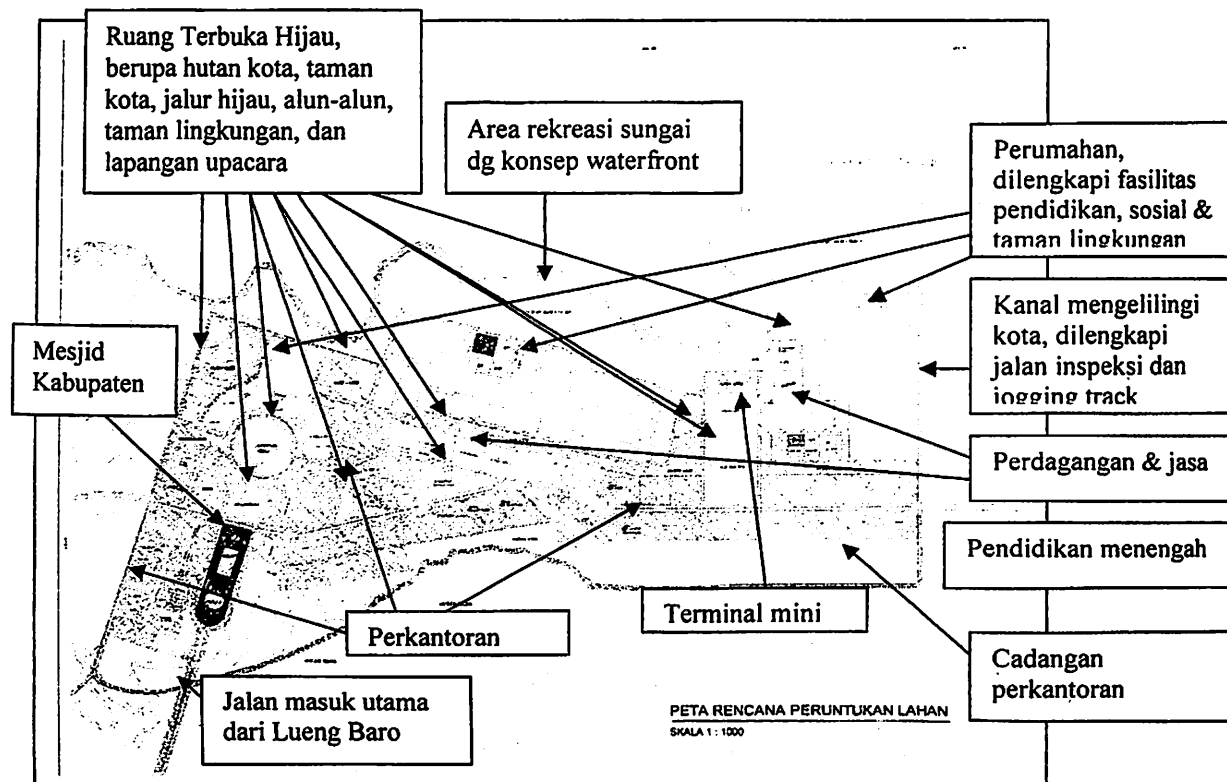
Jaringan utilitas dikembangkan mengikuti pola-pola jalan dan berada dalam ruang jalan. Dalam jarak tertentu dan

dipersimpangan terdapat pengontrol utilitas. Cara penempatan utilitas dengan 3 cara, 1). Cara di tanam di dalam tanah, untuk jaringan air bersih (berupa pipa); 2). Cara terbuka di atas tanah (untuk jaringan drainase), 3). Cara melayang di udara (untuk jaringan listrik, jaringan telepon), berupa kabel yang dilengkapi tiang.

Tabel 1. Kebutuhan Lahan untuk Fasilitas Kota

Fasilitas	Kebutuhan (Ha)
1. Lahan Perkantoran Pemerintahan	38
2. Lahan perumahan	36,12
3. Lahan fasilitas peribadatan	4,28
4. Lahan perdagangan/ pasar lokal	5,98
5. Lahan fasilitas kesehatan	0,7
6. Lahan fasilitas pendidikan	5,48
7. Lahan daerah terbuka/ taman/olahraga	12,4
8. Lahan daerah penyangga/jalur hijau	169,74
9. Lahan pergerakan/ sirkulasi/jalan	26,6
10. Lahan fasilitas budaya dan rekreasi	0,7
Total Luas	300

Untuk melihat peruntukan lahan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Peta Rencana Peruntukan Lahan

KESIMPULAN

Suka Makmue sangat potensial dikembangkan sebagai Kota Pemerintahan Nagan Raya, karena mempunyai aksesibilitas yang tinggi, dan kondisi lahan yang masih kosong dari infrastruktur dan penduduk sehingga relatif mudah dalam perencanaan tata ruang kotanya.

PUSTAKA

Dahlan, Endes Nurfilmarasa (2004), *Membangun Kota Kebun Bernuansa Hutan Kota*, Bogor : IPB Press.

Gallion, FAIA., Arthur B. Dan Simon Eisner (1996), *Pengantar Perancangan Kota (desain dan perencanaan kota)*, Jakarta : Erlangga.

Hariyono, MT., Drs. Paulus (2007), *Sosiologi Kota untuk Arsitek*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Cut Nursaniah, ST, M.T, adalah staf pengajar tetap pada Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh

Membangun Rantai Sejarah Sebagai Pembentuk Citra Kota Banda Aceh Pasca Tsunami (Kajian Bangunan Museum Tsunami)

Oleh: Ir. Elysa Wulandari, MT

Pendahuluan

Kota Banda Aceh telah berkembang hampir 8 abad yang lalu dimulai dengan kehadiran kerajaan awal Islam yang meletakkan dasar-dasar kota di sekitar pesisir Utara Aceh dan berdekatan dengan muara sungai Kr. Aceh.¹ Selanjutnya kota Banda Aceh mengalami periode perkembangan yang terkait dengan kolonialisme yang menyebabkan kota tumbuh di sekitar sungai Kr. Aceh yang melebar secara radial dan meninggalkan beberapa objek bangunan yang letaknya berdekatan dalam kawasan yang dikenal sebagai kawasan budaya. Masjid Raya Baiturrahman sebagai pembentuk citra kota Banda Aceh sebagai kota Islami yang pusaran aktivitas masyarakat tertuju ke sana. Setelah tsunami yang maha dasyat menghancurkan hampir sepertiga kota Banda Aceh, maka muncul bangunan yang spektakuler berupa museum tsunami di kawasan budaya tersebut untuk mengenang peristiwa tsunami tersebut.

Ridwan Kamil sebagai arsitek museum tsunami yang memiliki latar belakang keilmuan tentang perancangan kota yang kuat dan sangat perhatian terhadap pengolahan ruang public kota, telah mengembangkan konsep: "*Rumoh Aceh sebagai Escape Hill*" sebagai simbol dasyatnya peristiwa tsunami dan sekaligus menciptakan ruang publik yang mengundang semua lapisan masyarakat untuk mengenal secara dekat peristiwa tsunami sebagai

proses pembelajaran dan bukan untuk ditakuti (bukan peristiwa *traumatic*).²

Lokasi Pertapakan Museum Tsunami dan Pengaruhnya terhadap Tata Nuan Kawasan Budaya Kota Banda Aceh

Kehadiran suatu bangunan di suatu tempat akan menimbulkan suatu interaksi penyatuan yang dapat menguatkan atau melemahkan keberadaan bangunan terhadap lingkungan sekitarnya. Kekuatan suatu tempat muncul berdasarkan fenomena geografis dan elemen-elemen buatan yang sudah muncul sebelumnya dan membentuk karakter dan jiwa yang unik dari tempat tersebut. Tempat dapat diolah oleh manusia untuk tujuan tertentu sebagai suatu karya seni membangun (arsitektur), seperti yang dikatakan oleh Sejarawan arsitektur Peter Collins: ruang (*space*) yang tepat dalam arsitektur yang mungkin juga berarti "*place*" (plaza, piazza) adalah karya seni terbesar yang mampu digarap oleh arsitek.³

Penempatan suatu objek di dalam suatu ruang akan membentuk struktur tempat yang baru yang secara perlahan akan termodifikasi sehingga serasi dan sesuai dengan kebutuhan manusia di tempat tersebut. Tantangan terbesar yang muncul adalah berkenaan dengan elemen dasar yang terdapat di tempat tersebut, bagaimana objek baru tersebut dapat bermakna pada lingkungan yang sudah ada maknanya. Untuk

¹ Elysa Wulandari dan Hilda Mufiaty, *Studi Sejarah dan Perencanaan Tata Ruang Kota Banda Aceh periode Kolonial Belanda*, Buletin Haba, No. 25, 2003, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh.

² *Rumoh Aceh as Escape Hill*; Sayembara Desain Museum Tsunami NAD, I-Arch, Indonesia Architecture Magazine, Fourteenth Issue, 2007.

³ Teori Arsitektur, penelusuran <http://www.google.com>.

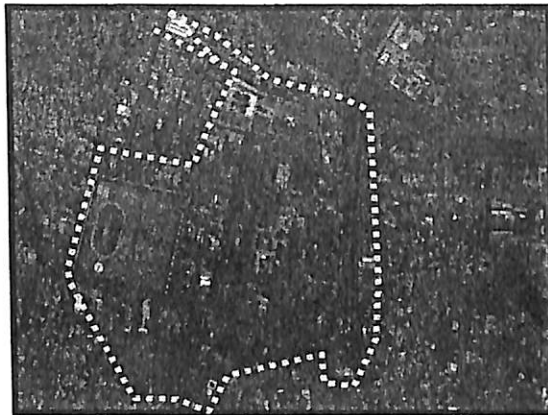
itu diperlukan suatu pemikiran untuk mengakali penempatan objek sehingga ide dari objek tersebut dapat bermakna dan serasi dengan kondisi tempat yang ada.

Dalam konteks tempat berada di kawasan Budaya, maka bangunan museum tsunami melengkapi gambaran perjalanan sejarah kota Banda Aceh di abad ke 21 yang sudah dimulai dari abad ke XIII. Hal tersebut sangat tepat untuk merangkai citra perjalanan sejarah kota.

Kajian keberadaan bangunan dari aspek eksternal kawasan, bahwa bangunan museum tsunami harus dapat dilihat dalam teknik pandangan berhirarki (jarak jauh, sedang dan dekat) dengan pendekatan *Kinetic Vision* (dapat dilihat sebagai suatu bentuk yang utuh dari segala arah).⁴ Sehingga skala pandangan terhadap objek yang mampu bercerita tentang gagasan dasar bangunan ini adalah jika jarak pandang berkisar 500 m. Saat ini lokasi bangunan museum tsunami tepat jika dikaitkan untuk jarak pandang yang terbuka dari segala arah, mengingat dikelilingi oleh ruang terbuka hijau berupa lapangan olahraga perlu penataan ruang di sekitar lingkungan objek ini menjadi penting, seperti pengaturan ketinggian bangunan yang tidak menutupi pandangan ke objek berupa pengendalian pembangunan pertokoan di sekitar Ujung jalan T. Umar yang mendekat ke Bundaran Jam Taman Sari, sehingga pembangunan kota tidak menekan objek-objek bersejarah dan akan terbentuk wajah kota yang khusus dan unik.

Kajian keberadaan bangunan dari aspek internal kawasan, bahwa dalam mewujudkan gagasan dalam suatu lingkungan yang sudah terbangun, sering terjadi konfrontasi terhadap keberadaan objek-objek yang sudah ada, terutama terhadap bangunan yang telah menjadi *fokal*

point. Oleh karena itu menurut Heidegger⁵, kehadiran objek baru (arsitektur) yang baik juga mampu merawat lingkungan tempat dimana ia berada. Suatu lingkungan di perkotaan dengan kepadatan dan kultur tertentu, sebuah karya arsitektur harus dapat mewakili dan merepresentasikannya dengan baik. Sedapat mungkin menghindari konfrontasi akibat salah penempatan. Namun dengan adanya konfrontasi dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang terbaik. Keberadaan bangunan museum tsunami sebagai bangunan publik, akan merubah wajah kawasan budaya kota Banda Aceh.



Gambar: Peta lokasi bangunan museum di kawasan Budaya Kota Banda Aceh

Kaitan dengan penempatan bangunan museum tsunami, yang cenderung dekat dengan bangunan ibadah mesjid Raya Baiturrahman, maka perwujudan bangunan dan segala aktivitas yang akan muncul harus dapat bersinergis dengan cita-cita kota Banda Aceh sebagai Kota Bandar Islami yang saat ini disimbolkan dengan keberadaan mesjid Raya tersebut. Di satu sisi gagasan arsitektur bangunan museum tsunami harus terwujud, namun di sisi lain terdapat gagasan besar tentang arah perkembangan kota Banda Aceh yang Islami sebagai gambaran kehidupan masyarakat Aceh yang diinginkan sepanjang

⁴Menurut Adolf Hildebrand: Citra yang ditangkap melalui *kinetic vision* pada mata si pengamat. Dalam buku *Ruang dalam Architecture* ed. Ind, hal : 97, karya: Cornelis Van de Ven (1991), Gramedia.

⁵Siregar, Laksmi G. (2006). *Makna Arsitektur: Suatu Refleksi Filosofis*. Penerbit Universitas Indonesia

masa, apakah bangunan museum tsunami dapat menerjemahkan Kebesaran Allah melalui peristiwa tsunami yang terwujud dalam rancangan bangunannya. Dengan kata lain, jika mesjid Raya Baiturrahman sebagai symbol verbal, maka bangunan museum sebagai symbol non verbal.

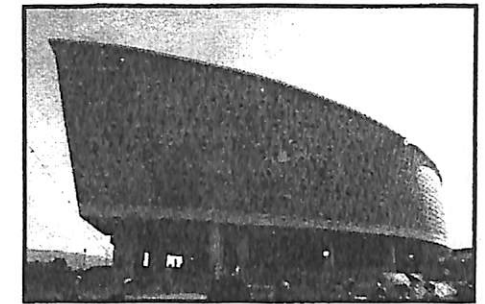
Komunikasi Arsitektural dan Proses Adaptasi

Penerimaan suatu objek oleh masyarakat melalui peristiwa interaksi antara objek dan subjek (pengamat) yang kemudian objek di tafsir oleh subjek. Dasar pemikirannya adalah relativitas yang sangat tergantung dari persepsi yang dapat ditimbulkan dari objek dan diterima oleh subjek. Terdapat 3 pendekatan yang menunjukkan tahapan persepsi dalam diri subjek (*Eugene Raskin*),⁶ yaitu:

1. Pendekatan *emotional evoked*: sejauh mana objek dapat merangsang emosi kita (emosional yang tergugah)
2. Pendekatan *emotional intended*: sejauh mana objek tersebut dapat di pahami oleh pengamat, kita ketahui objek hadir selalu memiliki maksud-masud tertentu.
3. Pendekatan *emotional contained*: sejauh mana objek tersebut dapat menyampaikan pesan dan kesan tertentu.

Melalui pemahaman ketiga hal di atas maka dapat dipahami tentang kehadiran ruang dan bentuk tertentu di suatu tempat. Dalam hal ini, pentingnya memahami fenomena komunikasi melalui simbol-simbol yang dapat di tangkap manusia. Untuk itu diperlukan simbol-simbol yang dikenal oleh manusia pengamat agar terjadi komunikasi dan kemudian akan terbangun hubungan emosional.

⁶Raskin, Eugene (1954), *Architectural Speaking*,



Gambar: Foto Bangunan tsunami dengan dilihat dalam 2 hirarki pandangan

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pengunjung museum tsunami, kesan bangunan sebagai *Rumoh Aceh* yang ditawarkan oleh Arsitek Bangunan Museum Tsunami, tidak dirasakan oleh masyarakat. Kesan yang ditimbulkan justru menyerupai kapal yang terbawa saat tsunami ke tengah kota. Hal ini merupakan bagian dari memori masyarakat dengan merferensi adanya kapal apung PLTD yang juga sampai ke darat. Lihat gambar di bawah.

Dalam kaitan dengan bangunan museum tsunami, justru simbol yang digunakan dalam menciptakan bentuk bangunan dan ruang sekitarnya malah menggambarkan bagaimana dasyatnya tsunami, sehingga benda-benda yang ada di laut seperti kapal dapat terdampar jauh ke daratan yang disimbolkan dengan keberadaan objek di dekat lingkungan permukiman. Untuk itu pendekatan *emotional intended* sudah terpenuhi, dan semua orang dapat memahami dengan mudah. Namun bagaimana *emotional contained* yang ingin

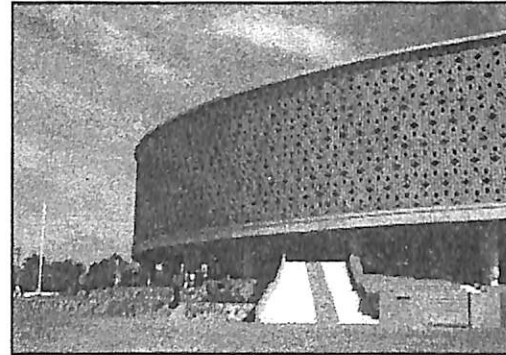
Wacana

disampaikan oleh bangunan museum tsunami tersebut, apakah merupakan suatu peringatan sebagai pembelajaran sehingga kita harus terus mawas diri atau kemudian hanya berhenti sebagai pengisi ruang publik kota. Hal ini kemudian terkait dengan bagaimana dapat menghadirkan orang secara terus menerus ke dalam kompleks tersebut, sehingga terbangun proses pembelajaran yang alamiah dan kemudian akan terbangun refleksitas terhadap peristiwa yang sejenis jika terjadi.

Proses pembelajaran tentang kehadiran bangunan museum tsunami diperlukan proses adaptasi dari masyarakat kota Banda Aceh. Menurut Quantrill⁷; Manusia akan menerima rangsangan dari sesuatu objek yang baru yang belum ada didalam pengalaman hidupnya, kemudian manusia akan secara perlahan menerima kehadiran objek tersebut yang terkait dengan keperluan-keperluannya. Jika keperluan manusia tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan berubah tingkat penerimaan terhadap objek tersebut. Hal ini sering terjadi pada bangunan publik yang tidak memperhitungkan aspek sosial budaya dan psikologis manusia dalam menghadirkan objek arsitektur sehingga bangunan sering terbengkalai tidak dimanfaatkan.

Perancang bangunan Museum Tsunami mencoba melihat kebutuhan masyarakat kota Banda Aceh melalui penyediaan ruang terbuka publik. Ruang publik berupa halaman perkarangan bangunan museum dirancang tanpa pagar masif terhadap ruang publik jalan di depannya, memberi kesan mengundang tanpa membayar. Walaupun bangunan museum belum berfungsi, namun orang sudah hadir untuk berekreasi di pekarangan tersebut. Fasilitas kolam air yang menjadi unsur rekreasi juga memberi pengalaman yang khusus, sehingga semua lapisan masyarakat menikmati keberadaan lingkungan bangunan museum tsunami. Sebagai proses

pembelajaran terhadap kehadiran bangunan tersebut, lama kelamaan akan sampai pada tahap pemahaman secara menyeluruh terhadap bangunan museum tsunami.



Gambar: Ruang publik di sekitar bangunan Museum Tsunami yang tampak akrab dipakai oleh masyarakat, merupakan hal yang positif untuk mengenal maksud bangunan ini lebih jauh.

Berbeda bangunan publik yang sudah ada di kawasan budaya tersebut seperti Taman Putroe Phang, Gunongan dan Kuburan Kerkoof, objek tersebut hanya dapat dilihat dari kejauhan tanpa manusia dapat berinteraksi secara bebas, sehingga lama kelamaan akan hilang dari memori masyarakat tentang keberadaan objek tersebut. Berbeda juga dengan kompleks mesjid Raya Baiturrahman, walaupun di pagar masif, namun fungsinya sebagai tempat ibadah yang hidup 24 jam, menyebabkan orang akan mendatanginya

⁷Quantrill, Malcom (1986) *The Environmental Memory*, Schoken Books, New York

Wacana

walaupun kadang tidak akomodatif seperti sarana air bersihnya kurang terawat. Tujuan orang datang ke Mesjid Raya Baiturrahman, bukan karena aspek fisik objek tetapi karena aspek spiritual dari objek tersebut.

Kesimpulan

Ide membangun museum tsunami di kawasan Budaya kota Banda Aceh adalah suatu yang positif, karena akan membentuk rantai sejarah kota Banda Aceh yang akan membentuk Citra kota Banda Aceh dengan segala peristiwa yang pernah di alaminya. Namun gagasan rancangan bangunan museum yang memberi pesan sebagai rumah

Aceh yang melayang saat tsunami, justru lebih berkesan sebagai bangunan kapal. Namun demikian, keberadaannya tetap dapat diterima karena masih menggambarkan suatu peristiwa dahsyat yang telah menjadi memori masyarakat. Hanya saja diperlukan proses penerimaan terus menerus terhadap keberadaan bangunan museum tsunami ini yang menjadi bagian kehidupan sebagaimana penerimaan bangunan mesjid raya melalui penyediaan aktivitas di ruang publik.

Ir.Elysa Wulandari, MT, adalah staf pengajar tetap pada Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh

Perluasan Ibukota Provinsi NAD: Perlukah?

Oleh: Titit Lestari, S.Si.

Pendahuluan

Kota adalah sebuah "benda" yang sangat dinamis, baik ditinjau dari segi sosial, ekonomi, kultural maupun spasialnya. Dan faktor utama yang menyumbangkan pesatnya dinamika kota adalah faktor kependudukan dan faktor kegiatan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk di kota jauh lebih tinggi jika dibanding dengan pertumbuhan penduduk tingkat nasional. Demikian juga yang terjadi di Banda Aceh di mana pertumbuhan penduduk juga relatif tinggi pasca tsunami. Meskipun tsunami banyak membawa korban jiwa dari penduduk kota Banda Aceh tetapi pertambahan penduduk juga meningkat secara signifikan yang diakibatkan tidak hanya dari *natural growth* tetapi juga aliran penduduk dari bagian wilayah lain yang masuk ke kota (*immigration*). Banyaknya pekerja dari luar Banda Aceh yang masuk ke kota Banda Aceh adalah kontribusi paling besar bagi pertumbuhan penduduk. Pertambahan penduduk yang makin meningkat memberikan konsekuensi terhadap kebutuhan ruang yang meningkat pula.

Konsekuensi *space* yang dihadapi kota Banda Aceh selain karena tuntutan kebutuhan pertambahan lahan permukiman penduduk dan juga banyaknya *space* atau ruang yang hilang akibat tsunami. Sebagai contoh, Ulee Lheue pada masa sebelum tsunami adalah daerah permukiman yang padat dengan segala fasilitas pendukungnya, akan tetapi pasca tsunami, banyak lahan di daerah Ulee Lheue yang hilang sehingga pemenuhan lahan untuk kebutuhan publik semakin berkurang. Secara otomatis kebutuhan lahan untuk fasilitas permukiman dan sarana prasarana masyarakat akan dialihkan ke daerah lain yang *space*-nya masih menyediakan ruang terbuka.

Dengan semakin berkembangnya kota Banda Aceh maka kebutuhan ruang untuk

permukiman maupun bangunan-bangunan guna mengakomodasi kegiatan menuntut konsekuensi spasial yang berupa tuntutan ruang yang lebih luas. Menurut Hadi Sabari Yunus, 2005, konsekuensi spasial yang muncul akibat perkembangan kota adalah konsekuensi keruangan secara fisikan dan konsekuensi keruangan secara yuridis administratif.¹

Potensi Konflik

Banda Aceh adalah ibukota provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Keberadaan Banda Aceh pasca tsunami memberikan fungsi lebih bagi kota ini. Keterbatasan lahan yang muncul pasca tsunami merupakan kendala utama bagi pengembangan kota Banda Aceh. Melihat kondisi ini muncul pemikiran kalangan elit untuk memperluas keberadaan ibukota provinsi ini. Yang kemudian menjadi masalah adalah bagaimana perluasan yang akan dilakukan guna mendukung fungsi kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi.

Pada tanggal 16 – 17 Desember 2008, Pemerintah Daerah menyelenggarakan seminar tentang pengembangan ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan hasil seminar muncul pernyataan sikap dari Ketua DPRK Aceh Besar, Musannif. Adapun isi pernyataan yang dibacakan Musannif itu adalah pihak DPRK Aceh Besar mendukung upaya pengembangan ibukota Provinsi Aceh ke wilayah Aceh Besar dalam bentuk pembangunan Kabupaten Aceh Besar. DPRK Aceh Besar menolak setiap upaya perluasan Kota Banda Aceh ke dalam wilayah Aceh

¹ Hadi Sabari Yunus, *Managemen Kota Perspektif Spatial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 59.

Besar, demikian antara lain pernyataan dari pihak DPRK Aceh Besar.²

Melihat hasil seminar tersebut semakin jelas bahwa kalangan elit pemerintahan Kabupaten Aceh Besar tidak menginginkan perluasan kota Banda diikuti dengan perluasan kota secara yuridis-administratif. Seiring perjalanan waktu, mau tidak mau kota Banda Aceh akan terus berkembang. Menyikapi tanggapan para elit pemerintahan, sebenarnya perluasan kota Banda Aceh tidak harus diasumsikan bahwa kota tersebut juga mengalami perluasan yuridis administratif, tetapi kita ambil positifnya bahwa kota secara alami akan berkembang secara fisikal. Artinya di sini bahwa kota berkembang secara fisikal akan alami mengikuti perkembangan sektor-sektor perkotaan, permukiman dan bangunan-bangunan pendukung kegiatan perkotaan.

Sebagai salah satu contoh, Yogyakarta adalah sebuah ibukota provinsi yang luasnya 32,5 Km² ³ yang luasnya hampir setengah luas kota Banda Aceh (61,36 km²)⁴ adalah kenyataan sebuah ibukota provinsi yang sangat kecil. Secara administratif, luas wilayah Kota Yogyakarta adalah sempit, tetapi secara morfologi, kota Yogyakarta mempunyai luas jauh lebih besar dari luas administratif. Sebagai contoh, Orang menyebut Universitas Gadjah mada berada di Kota Yogyakarta, secara administratif hal ini adalah salah karena Universitas Yogyakarta terletak di Kabupaten Sleman, tetapi secara morfologi adalah benar karena Kota Yogyakarta meluas hingga ke kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

Belajar dari kasus di atas, maka pengembangan Kota Banda Aceh seharusnya secara yuridis-administratif tidak harus menjadi masalah, tetapi yang perlu dipikirkan adalah ke arah mana

², *Serambi Indonesia*, 17 Desember 2008, hlm 3.

³ <http://www.jogjakota.go.id/>, diakses tanggal 16 April 2009

⁴ <http://www.bandaacehkota.go.id/>, diakses tanggal 16 April 2009

perkembangan Kota Banda Aceh, konsep apa yang akan digunakan untuk memberikan wajah kota menggambarkan budaya kota itu sendiri.

Ke mana Banda Aceh Berkembang?

Perkembangan sebuah kota secara spasial dapat berupa perkembangan secara horizontal maupun secara vertikal.⁵ Perkembangan kota secara horizontal dimungkinkan karena makin padatnya bangunan di bagian dalam kota sehingga dibutuhkan penambahan ruang guna menampung kebutuhan akan ruang tersebut. Proses penambahan ruang yang secara horizontal atau mendatar ini akan menempati ruang-ruang di sekitar kota yang masih kosong, misalnya di daerah pinggiran kota. Proses perkembangan horizontal yang mengarah ke pinggiran kota (*centrifugal spatial development*) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: Aksesibilitas, pelayanan umum (*public service*), karakteristik lahan, karakteristik pemilik lahan, keberadaan peraturan-peraturan yang mengatur tataguna lahan, dan prakarsa pengembang. Aksesibilitas yang dimaksud dalam tulisan ini adalah aksesibilitas fisikal. Aksesibilitas fisikal adalah tingkat kemudahan suatu lokasi dapat dijangkau oleh berbagai lokasi lain (Lee: 1979).⁶ Daerah dengan aksesibilitas yang tinggi akan mempunyai daya tarik lebih dibanding dengan daerah yang mempunyai aksesibilitas fisikal rendah. Akibat yang muncul adalah daerah-daerah dengan aksesibilitas fisikal tinggi akan mengalami perkembangan fisikal yang lebih intensif. Sebagai salah satu contoh, pembangunan beberapa jalan tembus yang dilakukan di beberapa lokasi di Banda Aceh diharapkan mampu menarik daerah di sekitarnya untuk terus berkembang. Faktor yang kedua, pelayanan umum.

Menjawab pertanyaan ke arah mana kota Banda Aceh sebaiknya dikembangkan adalah sebuah kebijakan yang harus

⁵ Hadi Sabari Yunus, *Managemen Kota Perspektif Spatial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 59.

⁶ *Ibid*, hlm 61.

mempertimbangkan berbagai sektor. Yang pertama, sektor tata ruang, mengingat kota Banda Aceh berada di pinggir pantai maka langkah yang baik adalah mengembangkan menjauh dari pantai. Pengalaman menunjukkan bahwa Banda Aceh sangat rentan terhadap bencana gelombang tsunami, maupun gelombang pasang. Sebagai upaya untuk menunjang gerakan konservasi pantai maka jauhkan pengembangan kota dari pantai. Maka langkah yang paling bijak adalah mengembangkan kota Banda Aceh ke arah selatan sepanjang jalan Medan-Banda Aceh. Secara aksesibilitas daerah ini merupakan jalur utama perdagangan dari dan ke Medan. Akan tetapi daerah ini adalah daerah yang tingkat produktivitas lahannya sangat tinggi, artinya lahan-lahan di seputaran zona ini sebagian besar adalah lahan produktif.

Jika dikembangkan ke arah selatan maka perkembangan kota secara administratif akan berkembang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Yang menjadi persoalan adalah polemik elit politik yang takut jika pengembangan ibukota propinsi akan serta merta mengembangkan secara administratif. Perkembangan sebuah kota secara morfologi tidak ada kaitannya dengan perkembangan secara administrative. Tetapi sebagai sebuah daerah yang akan terkena dampak perluasan kota secara morfologis perlu adanya koordinasi perencanaan tata ruang agar semua kepentingan dapat terakomodir. Sebagai salah satu contoh bahwa arah perkembangan Kota Banda Aceh saat ini adalah mengarah ke daerah-daerah yang menjauh dari pantai, dan sebagian besar daerah tersebut nantinya akan berada di Kabupaten Aceh Besar. Melihat kondisi ini maka Pemerintah Aceh Besar harus mempunyai perencanaan yang matang ke arah mana sebaiknya kota ini dikembangkan.

Kasus perkembangan kota Banda Aceh ini dapat dikatakan sebagai sebuah kasus yang unik. Umumnya sebuah kota dikembangkan karena kota tersebut mempunyai beban yang berat dalam

funksinya sebagai pusat perdagangan, pemerintahan, dan jasa. Akan tetapi Banda Aceh berkembang akibat trauma bencana tsunami Desember 2004. Kerusakan dan hilangnya beberapa kawasan di pinggir pantai mengakibatkan desakan kebutuhan lahan ke arah pegunungan, yaitu mengarah ke jalan Medan-Banda Aceh.

Melihat kondisi ini perlu adanya kajian yang mendalam secara ekonomi maupun ekologi agar pembangunan dapat berjalan *sustainable*. Masalah yang mungkin akan muncul adalah kearah mana sebaiknya kota Banda Aceh dikembangkan. Secara teori, perkembangan sebuah kota secara fisik meliputi perkembangan yang horizontal dan vertikal.

Peran Banda Aceh

Banda Aceh sebagai salah sebuah ibukota propinsi mempunyai kedudukan yang strategis. Artinya bahwa Banda Aceh mempunyai jenjang (hirarki) yang lebih tinggi dibanding kota-kota lainnya di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebagai sebuah kota dengan hirarki paling tinggi maka Banda Aceh mempunyai peluang besar untuk dikembangkan dalam rangka tugas dan fungsinya. Mengingat keterbatasan ruang yang dimiliki Banda Aceh, maka perlu adanya pelimpahan tugas dan fungsinya ke daerah-daerah sekitarnya. Banda Aceh sebagai sebuah kota tua juga harus berbesar hati untuk membagi perannya dengan daerah-daerah sekitarnya. Artinya bahwa perkembangan kota tidak harus diikuti dengan perluasan yuridis administrasi. Dengan adanya perkembangan kota, baik kota Banda Aceh maupun kota-kota yang langsung berbatasan dengan kota Banda Aceh, secara politis, justru menguntungkan Kota Banda Aceh. Masyarakat akan memandang bahwa "kota yang telah berkembang", baik Kota Banda Aceh, maupun wilayah di sekitarnya akan tetap disebut Kota Banda Aceh.

Jika sebagian tugas dan fungsi ibukota Propinsi NAD dapat dilimpahkan pada daerah di sekitarnya, maka Banda Aceh

dapat menata diri menjadi sebuah kota dengan konsep yang baru. Kota Banda Aceh yang tahun ini menginjak usia 804 tahun adalah sebuah kota yang sudah pasti mempunyai perjalanan sejarah yang panjang. Sebagai sebuah kota yang relatif tua maka saatnya Banda Aceh mulai mempercantik diri dengan menggali potensi yang dimiliki. Banda Aceh mempunyai potensi peninggalan sejarah yang sangat tinggi. Jika potensi ini tidak dikembangkan maka tidak tertutup kemungkinan, Banda Aceh akan mati. Pada dasarnya kota itu seperti layaknya makhluk hidup, dia lahir, tumbuh, berkembang dan mati, akan tetapi jika tetap dipelihara maka kota tersebut akan dapat tetap hidup. Jika sebagian besar fungsi pemerintahan, jasa dan perdagangan nantinya akan bergeser ke daerah-daerah di pinggiran kota yang lebih leluasa menyediakan ruang, maka kota Banda Aceh akan mulai dapat mempertahankan kota dengan merevitalisasi peninggalan-peninggalan sejarahnya. Banda Aceh dengan usianya yang relatif tua mempunyai perjalanan sejarah yang panjang. Tahapan-tahapan sejarah perkembangan kota ini sebenarnya tampak dari berbagai arsitektur-arsitektur yang mewakili zamannya. Melihat potensi sejarah perkembangan kota yang diwujudkan dari beberapa visual bangunan, maka Banda Aceh mempunyai peluang besar untuk dikembangkan sebagai sebuah kota sejarah. Untuk mengembangkan Banda Aceh sebagai sebuah kota Sejarah perlu adanya upaya untuk merumuskan desain apa yang cocok bagi perkembangan kota Banda Aceh sebagai kota sejarah. Selain situs sejarah, Banda Aceh banyak menyimpan situs peninggalan peristiwa dahyat sepanjang abad, yaitu situs tsunami.

Peran Aceh Besar

Sebagai sebuah kawasan yang langsung berbatasan dengan ibukota propinsi maka Aceh Besar harus mempersiapkan diri untuk menampung limpahan fungsi ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ketersediaan lahan yang cukup luas

memberikan keleluasaan bagi Pemerintahan Daerah Aceh Besar untuk menata kawasan berdasarkan fungsi dan peruntukannya. Sebagai sebuah kawasan yang banyak memiliki lahan produktif yang letaknya dekat dengan perbatasan kota Banda Aceh, maka perlu adanya perencanaan yang matang agar tidak mengorbankan lahan-lahan produktif untuk dialihfungsikan sebagai lahan untuk bangunan.

Perencanaan tataruang yang matang akan menjadikan sebuah kota yang berwawasan lingkungan. Pada umumnya lingkungan kota berkembang secara ekonomis, namun menurun secara ekologis. Perkembangan kota di Indonesia dewasa ini cenderung ke arah perkembangan fisik yang lebih banyak ditentukan oleh banyaknya sarana dan prasarana yang ada. Akibatnya, ruang terbuka hijau terabaikan, bahkan menghilangkan wajah alam yang asri. Kawasan hijau sering kali dikalahkan atau dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, permukiman, perindustrian, serta untuk sarana dan prasarana kota lainnya. Sebagai daerah yang nantinya akan berkembang, pihak Pemerintah Daerah Aceh Besar agar terus mempersiapkan diri guna membangun kota agar kota-kota yang akan muncul di sepanjang perbatasan dengan Kota Banda Aceh dapat berkembang maksimal dengan mengacu pada pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Perluasan ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengarah pada perluasan secara morfologis, akan memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Aceh Besar ke depannya. Kota-kota di Aceh Besar akan memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat berkembang bersama dengan kota Banda Aceh untuk menjadi sebuah "Kota Besar", seperti halnya Jabodetabek. Tidak tertutup kemungkinan bahwa kota-kota yang ada di Aceh Besar, seperti Lambaro, Lhoknga, Sibreh, dan Indrapuri akan menjadi kota yang lebih maju dan lebih besar dibanding Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten.

Penutup

Pada intinya bahwa perluasan ibukota provinsi memang perlu dilakukan mengingat semakin besarnya tugas dan fungsinya disamping sebagai pusat pemerintahan juga menjadi pusat perdagangan, pusat pelayanan dan jasa, pusat industri, bahkan pusat pendidikan. Tetapi perluasan ibukota tidak harus diikuti dengan perluasan administrasi. Untuk menghindari konflik antar daerah

maka perkembangan ibukota provinsi tetap dilakukan tetapi hanya pada konsep perkembangan kota secara morfologis. Perlu adanya kerjasama antar daerah-daerah yang akan terkena dampak perluasan ibukota ini untuk bersama-sama membangun sebuah kota besar yang nyaman dan berwawasan lingkungan.

Titit Lestari, S.Si adalah tenaga Peneliti Pertama pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Banda Aceh Kota Ruko : Reproduksi Budaya Massa

Oleh: Agung Suryo Setyantoro

Pendahuluan

Kota bagi sebagian masyarakat tanpa sadar hanya dikaitkan dengan aktivitas rutin yang hingar-bingar. Tak terkecuali dengan yang terjadi di Kota Banda Aceh. Kesibukan masyarakat menjadi pemandangan sehari-hari di dalamnya. Kota acap kali dicerca, bahwa sebagian besar kota tumbuh pesat menjadi kota yang tidak manusiawi. Bangunan-bangunan baru dengan arsitektur modern, teknologi canggih bermunculan tanpa mempedulikan terciptanya ruang sosial, ruang untuk publik atau komunitas. Masing-masing hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Curahan perhatian yang terlalu ditekankan pada aspek keuntungan ekonomis dan kecanggihan teknologi dengan melecehkan manfaat sosial atau kepentingan masyarakat banyak, khususnya pada pembangunan fasilitas komersial oleh pihak swasta.



Deretan Ruko di Sudut Kota Banda Aceh

Eko Budihardjo dan Sudanti Hardjohubojo¹ menyebutkan bahwa kota-kota di Indonesia pada umumnya berkembang secara *laissez-faire*, tanpa dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu, bukanlah suatu

pemandangan yang aneh apabila kota-kota di Indonesia menampilkan wajah ganda. Di satu sisi terlihat perkembangan pembangunan yang serba mengesankan dalam wujud arsitektur modern dan pasca modern di sepanjang tepi jalan utama kota. Di balik semua keanggunan itu, nampak menjamurnya lingkungan kumuh dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia yang berbudaya.

Perkembangan kota-kota yang semakin tak teratur pun terjadi bukan hanya semata-mata karena pertumbuhan populasi yang besar. Kecenderungan angka urbanisasi lebih besar dari angka reurbanisasi. Dengan kata lain, orang lebih senang melakukan migrasi ke kota daripada ke luar kota. Mungkin hal ini muncul karena adanya pandangan bahwa kota dapat menyediakan kehidupan yang lebih baik dari pada tinggal di pedesaan. Memang semua fasilitas kehidupan tersedia di kota. Dan terjadilah berbagai efek dari memadatnya kota tersebut. Kota menjadi semakin tidak teratur, baik dilihat secara fisik maupun dari kacamata kehidupan sosial yang terjadi.

Permasalahan yang terjadi karena pemadatan penduduk beraneka ragam. Dimulai dari masalah fisik sampai masalah sosial. Masalah fisik yang terjadi contohnya seperti munculnya permukiman kumuh, pencemaran udara, sulitnya air bersih, menumpuknya sampah, kemacetan yang terjadi hampir setiap detik, dan segudang permasalahan lainnya.

Beberapa tahun yang lalu ketika penulis baru menginjakkan kaki di Banda Aceh, kota ini tidak begitu ramai bila dibandingkan dengan kondisi yang terlihat sekarang. Dahulu ketika menyusuri jalanan, kita masih dapat menikmati persawahan-persawahan di sepanjang jalan. Namun

¹ Eko Budihardjo dan Sudanti Hardjohubojo, *Kota Berwawasan Lingkungan* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 1.

sekarang di beberapa tempat terjadi pengalihan fungsi lahan. Sawah-sawah produktif berubah menjadi bangunan-bangunan ruko atau rumah toko yang mulai menjamur dengan bentuk yang sangat khas dan homogen yaitu kotak memanjang. Entah mengapa begitu semangatnya kota Banda Aceh mengalami perubahan yang sangat mencolok dengan tata ruangnya. Selain itu juga muncul permasalahan turunan dari semakin maraknya pembangunan ruko yang dijadikan pertokoan, seperti kemacetan yang semakin banyak di sepanjang jalan yang terdapat ruko-ruko.

Tata Kota dalam Perkembangan Budaya

Fenomena, sistem, struktur, masyarakat, individu membutuhkan satu ruang (space) dan tempat (place). Anthony Giddens (1984) mengatakan 'memahami bagaimana aktivitas manusia terdistribusi dalam ruang merupakan sesuatu yang mendasar dalam analisis tentang kehidupan sosial. Interaksi manusia menempati ruang-ruang tertentu yang punya banyak makna sosial. Inilah salah satu yang membawa satu perubahan dalam ilmu pengetahuan khususnya teori sosial dan budaya untuk didalami dan mendalaminya. Bagaimana dinamisnya fenomena, interaksi, perubahan sosial. Dimana kota sebagai sebuah ruang (space) dan tempat (place), juga menjadikannya sebagai subkultur. Dan yang selama ini masih menjadi salah satu tema yang kurang diperhatikan dalam perbincangan mengenai masyarakat Indonesia modern.²

Sementara Kuntowijoyo mengatakan, budaya massa lahir akibat proses massifikasi dan memiliki tiga ciri utama: obyektivasi, alienasi, dan pembodohan. Obyektivasi dalam budaya massa terjadi karena pemilik hanya menjadi obyek yang tidak memiliki peran apa-apa dalam pembentukan simbol budaya. Alienasi berarti pemilik budaya massa terasing dari dan dalam kenyataan

hidup. Mereka hidup dalam ingar-bingar dan gemuruh kehidupan masa kini, tetapi pada saat yang sama kehilangan identitas dirinya. Dan pembodohan terjadi karena budaya massa hanya melahirkan kesibukan fisik, kepadatan jadwal, tanpa pengalaman mendapatkan pengalaman baru, apalagi momen-momen reflektif Siasat kebudayaan³.

Pragmatisme atas kultur kota terjadi ketika mobilitas manusia dituntun oleh mobilitas benda. Orientasi sebagai konsumen merupakan pendorong mobilitas itu. Dalam kehidupan masa kini, semua ruang seolah merupakan wilayah ekspansi modal. Ini berbeda, misalnya dengan tradisi yang muncul dalam model tradisional di Aceh yang mulai punah. Jika kita mencoba melihat lebih dalam, penjadwalan pasar-pasar tradisional seperti *Uroe Gantoe* yang akrab dalam masyarakat Aceh itu sebenarnya merupakan siasat kebudayaan.

Dengan model *Uroe Gantoe*, pasar tradisional tak hanya sarat dengan motivasi ekonomi. Di dalam pasar tradisional ada semangat untuk memberi ruang non-ekonomi, yakni kosmologi tentang sirkulasi dan pergerakan manusia supaya mengenal orang lain. Sebagai contoh *Uroe Gantoe* di Sibreh, pasar hanya akan ramai pada hari Rabu saja, maka selain hari Rabu hiruk-pikuk berhenti. Kepadatan kerumunan berkurang. Volume sampah bisa dikurangi di satu tempat.

Sedangkan pasar-pasar hipermodern berjaga tanpa jeda yang diakomodir oleh sebagian besar ruko yang berderet dan hampir memenuhi kota Banda Aceh, tanpa jadwal, tanpa perbincangan hangat antara pedagang dan pelanggan. Di hipermarket, kegaduhan berlangsung dalam suasana tunasosial. Tidak ada lagi hubungan interpersonal yang intim antara pedagang dengan pembeli, yang terjadi adalah relasi yang beku.

Pembangunan fisik material dalam hal ini menjadi poin penting dalam

pembangunan kota. Dimana dan bagaimana mengoptimalkan setiap milimeter lahan dalam tempat terhadap ruang. Dan kemungkinan sekecil apapun dalam relasi makna investasi, identitas terhadap ruang. Kota sebagai daerah pemukiman berarti juga merupakan akumulasi atas klaim tempat terhadap ruang yang terbentuk dan sekaligus juga membentuk fenomena sosial dari proses-proses yang terkonstruksi. Pada gilirannya melahirkan estetika modernisme dan kebebasan dari kontrol-kontrol tradisi.⁴

Pola reproduksi perilaku penanda identitas itu, sama halnya dengan sebagian besar atau kecil orang memilih berbelanja di kawasan ruko-ruko yang mulai menjamur di kota Banda Aceh. Dengan alasan lebih cepat dan lebih modern, masyarakat mulai menjauhi pasar-pasar tradisional. Komunikasi budaya yang biasa terjadi dalam transaksi di pasar tradisional menjadi hal yang langka lagi dalam masyarakat kita.

Adakah perubahan budaya pada masyarakat Banda Aceh dengan hadirnya banyak ruko? Yang pasti jawabannya adalah jelas masyarakat Banda Aceh sedang mengalami proses perubahan budaya.

Penutup

Arsitektur *Rumoh Aceh* akan tinggal kenangan, jika kita melihat pada pemandangan kota Banda Aceh yang kaku dengan ruko-ruko "congkak"nya. Kearifan tradisional *indatu* dalam merancang arsitek yang peka dengan lingkungan dengan memperhatikan struktur budaya masyarakat Aceh seakan-akan telah mengalami keterputusan generasi arsitek selanjutnya.

Homogenisasi tata ruang perkotaan sedang menjalar di kota Banda Aceh, begitu kira-kira yang sedang terjadi di kota Banda Aceh. Sepanjang jalan ruko-ruko mendominasi wajah kota. Baik digunakan untuk pertokoan ataupun perkantoran. Citra kota yang sesungguhnya tidak sekedar terbentuk dari monumen-monumen gedung-gedung yang terlihat modern, tetapi juga

nuansa gerak, tingkah dan aktivitas manusia. Daya tarik kota justru kadang-kadang terpancar dari latar kegiatan ala *bazaar* yang serba tidak terduga dan sulit ditebak tetapi penuh makna.

Tata ruang Kota Banda Aceh semestinya jangan menuju pada bangunan vertikal karena akan menjadi serupa dengan kota lain. Bangunan vertikal menggunakan teknologi replikatif yang melahirkan keseragaman pada struktur, ketinggian, dan bidang tertentu. Konsep vertikal muncul dengan semangat rasionalisasi, efisiensi, dan optimalisasi.

Generasi instant yang tidak mau direpotkan dengan pola-pola pokok arsitektur tradisional *Rumoh Aceh* bermunculan. Masyarakat menjadi terasing dengan dirinya dan juga budayanya. Menurut Horkheimer⁵, sikap manusia terhadap alam termaktub dalam ajaran *survival*: penaklukan alam demi *self-preservation*. Orang bisa *survive* kalau ia sukses mempertahankan diri terhadap alam sekitarnya. Demi *self-preservation*, berabad-abad lamanya orang berusaha menaklukkan alam. Ia juga berpendapat, dengan membendakan dan memperlak alam, manusia harus merelakan dirinya dibendakan dan diperalat alam. Bentuk perbudakan alam atas manusia ini nampak dalam penindasan yang dilakukan oleh kekuatan pasar dan modal, yang buta dan tidak sadar tapi kongkret karena nyata-nyata menuntut manusia menyesuaikan diri kepada mereka secara alamiah dan tanpa kesadaran. Dengan demikian berarti manusia harus memasrahkan diri untuk menjadi alat yang berfungsi dalam sistem alamiah tersebut.

Yang lebih merisaukan lagi adalah kenyataan bahwa perencanaan pembangunan ruko, pusat perbelanjaan, pasar dan semacamnya, terlalu berkiblat pada kaidah-kaidah perancangan Barat. Kurang mengacu pada khasanah setempat yang sebetulnya cukup kaya untuk ditimba sebagai sumber

² Ahmads, "Wajah Kota dalam Kajian Budaya" dalam <http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=121341>

³ Adde Marup Wirasjenaya, "Kaum Insomnia Kota Bu(d)aya, Apa Kabar?" dalam <http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/opini/artikel.php?aid=12575>

⁴ Ibid.

⁵ Lihat dalam Sindhunata, *Dilema Usaha manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern* oleh Max Horkheimer dalam *Rangka Sekolah Frankfurt* (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hlm. 109-111.

ilham perancangan arsitektur perkotaan yang berpribadi.

Konteks sejarah dan budaya lokal yang menjejantah dalam bentuk tata ruang, ornamen dan detail yang unik sesungguhnya akan memberikan pengayaan nilai dan makna pada kota kita sebagai perwujudan kota yang manusiawi atau *humanopolis*.⁶

Desain-desain yang berasal dari budaya lokal di Indonesia pada era global kini berhadapan pada pilihan-pilihan dilematis. Di satu sisi, globalisasi dianggap sebagai sebuah "peluang" bagi pengembangan potensi diri, sementara di lain sisi globalisasi dilihat sebagai ancaman terhadap eksistensi desain-desain lokal dan keberlanjutan budaya itu sendiri. Dalam situasi dilematis ini, diperlukan strategi untuk mengaktualisasikan keunggulan lokal (*local genius*) di dalam konteks global dan menghindarkan pengaruh homogenisasi budaya, serta masuknya desain-desain dari budaya luar.⁷

Permasalahan alih fungsi lahan menjadi ruko-ruko secara sporadis di Banda Aceh perlu pengaturan lagi dan dapat lebih ditekan perkembangannya agar tidak terlanjur menjadi masalah pemanfaatan ruang yang tidak efektif dan efisien. Pembangunan kota harus ditekankan pada kesatuan langkah yang mempertimbangkan aspek-aspek yang tidak bisa dipisahkan dengan proses pelestarian. Karena melakukan upaya pelestarian (mempertahankan) ruang publik merupakan suatu usaha pembangunan yang berbasis budaya-ekologi-masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Agung Suryo Setyantoro, S.S. adalah tenaga Teknis pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Sebagaimana cara pandang *Geertz* dengan tesisnya mengenai involusi pertanian, maka tidak dapat dihindari lagi Kota Banda Aceh akan mengalami apa yang dinamakan involusi perkotaan seandainya Kota Banda Aceh tidak segera memperhatikan tata ruang kota dengan lebih arif dan bijaksana. Kota, seperti halnya dengan arsitektur, sering disebut sebagai cerminan budaya masyarakatnya. Maka pembangunan kota yang berbudaya merupakan tantangan yang menggairahkan untuk disiasati oleh kita semua, yang merasa sebagai warga Kota Banda Aceh.

Bangunan berkonsep *locus solus*⁸ yang mengakomodir keunikan atau karakteristik tempat, yang membedakannya secara signifikan dengan tempat lain, merupakan wacana yang tepat ditengah keringnya konsep pembangunan perkotaan yang semakin hari semakin dijejali dengan konsep-konsep perancangan "modern" yang berlandaskan fungsionalisme sempit dan formalitas hampa. Kota diharapkan tidak hanya sekedar sebagai wadah aktivitas manusia masa kini saja, melainkan juga sebagai sumber kenangan masa lampau dan arena berfantasi masa depan.

⁶Lihat dalam Eko Budihardjo dan Sudanti Hardjohubojo, *Op.cit.*, hlm. 68-70.

⁷Gede Mugi Raharja, "Aktualisasi Keunggulan Lokal dalam Ruang Arsitektural" dalam <http://www.balipost.co.id/balipostcetaK/2005/9/4/des1.htm>

Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Oleh: Ruksana dan Sri Waryanti

Pendahuluan

Salah satu unsur penting dalam pembangunan adalah penataan ruang. Penataan ruang merupakan salah satu perangkat kebijakan pembangunan yang strategis, baik secara nasional maupun daerah. Upaya penataan ruang di Indonesia telah dimulai dari sejak Pelita I. Penataan ruang ini dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya, menyusun rencana garis besar kota dan rencana induk kota, wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, tata guna kesepakatan, dan sebagainya. Dalam upaya tersebut telah digunakan berbagai kriteria, baik sektoral maupun regional.

Penataan ruang menjadi sangat penting sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk yang cepat menuntut penggunaan lahan yang lebih luas mengikuti aktivitas sosial dan ekonomi yang semakin meningkat pula. Tidak mengherankan, kemudian berkembanglah perkampungan di lereng yang terjal, di hutan alam, dan di seputaran kota. Selain itu, berkembang pula kawasan industri dan perumahan di tengah-tengah kawasan persawahan yang subur, di atas situs purbakala, di sepanjang tepi jalan, bantaran sungai, sempadan pantai, dan sebagainya.

Kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat yang semakin dinamis pada akhirnya dapat menimbulkan konflik penggunaan lahan yang makin rumit dan sukar diatasi, sehingga membangkitkan berbagai masalah sosial budaya. Beberapa contoh konflik pemanfaatan ruang yang telah memicu keresahan sosial adalah Bopunjur di Bandung Utara, di Bekasi, dan di Kedungombo. Walaupun demikian, harus diakui pula bahwa pembangunan oleh

masyarakat juga telah menghasilkan pemanfaatan tata ruang yang lebih bermutu, baik ditinjau dari segi nilai tambah maupun lapangan kerja, seperti kawasan perkebunan yang produktif, kawasan industri yang maju, kawasan perumahan yang baik, dan kota yang rapi serta nyaman.

Konflik pemanfaatan tata ruang yang menyebabkan tidak efesiennya pemanfaatan ruang telah merangsang upaya untuk menyatukan sistem pengelolaan tata ruang, baik secara nasional maupun secara daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas ruang, meningkatkan keserasian antara pemanfaatan ruang dan fungsi lingkungan hidup, meningkatkan keselarasan perkembangan antarkawasan, mempercepat per-kembangan kawasan tertinggal dan meningkatkan pemerataan pembangunan antardaerah dan kawasan, memperkuat kesatuan dan persatuan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan semangat seperti dipaparkan di atas, secara nasional, sejak tahun 1992 diberlakukan Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang yang dirancang untuk memadukan berbagai pengaturan penataan ruang yang bersifat sektoral menjadi suatu kesatuan yang saling berkait dan memberi tempat bagi keperluan semua sektor dan semua orang serta memelihara fungsi lingkungan hidup. Dalam Undang-undang No. 24 tentang tata ruang tersebut telah dirumuskan kawasan budi daya dan kawasan lindung, serta ketentuan-ketentuan perencanaan dan penggunaan ruang lebih maju tidak hanya dari aspek fisik ruang, tetapi juga aspek ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan nasional.

Dalam konteks Aceh, khususnya kota Banda Aceh, pengaturan tentang tata ruang telah pula ditetapkan melalui sebuah produk hukum. Pada tahun 2003 pemerintah kota Banda Aceh telah menetapkan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002-2010. Dalam qanun tersebut telah diatur peruntukan lahan/wilayah yang ada di Banda Aceh. Sesuai dengan perkembangan wilayah yang terus-menerus tentunya qanun tersebut harus dilihat kembali untuk disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan kehidupan sosial budaya masyarakat Banda Aceh. Untuk itu, pada tahun 2007 telah diluncurkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027. Tulisan ini membahas kedua qanun tersebut untuk melihat perubahan-perubahan orientasi dalam penulisan qanun. Agar tulisan ini lebih fokus, penulis membahas pada aspek peran serta masyarakat saja.

Kerangka Konsep

1. Tata Ruang

Pada bagian di atas telah sekilas dipaparkan tentang tujuan dari penataan ruang. Diharapkan adanya penataan ruang terjadi pemanfaatan ruang yang dilandasi oleh wawasan lingkungan, pengaturan pemanfaatan yang memperhatikan fungsi kawasan lindung dan budi daya, sehingga pemanfaatan yang berkualitas dapat tercapai. Upaya penataan ruang ini juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkesinambungan dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya.

Menurut Ginanjar Kartasasmita¹ penataan ruang secara umum memiliki pengertian sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, atau pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang harus terkait satu sama lain. Jadi, di dalam penataan ruang

¹Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. (Jakarta: Cides, 1996). Hlm. 426.

terkandung berbagai pengertian mengenai tata ruang yang komprehensif.

Kalau Ginanjar Kartasasmita melihat tata ruang dari dimensi pengorganisasian penataan tata ruang lain halnya pengertian tata ruang menurut Rappaport² yang menyatakan bahwa

"Tata ruang mengandung arti penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan. Tata ruang pada hakikatnya merupakan lingkungan fisik yang mempunyai hubungan organisatoris/fungsional antara berbagai macam objek dan manusia yang terpisah dalam ruang-ruang tertentu".

Di dalam tata ruang, tercakup distribusi tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Tata ruang dalam hal ini, menurut Wetzling³ merupakan jabaran dari suatu produk perencanaan fisik. Dengan kata lain, tinjauan pengertian struktur ruang harus tetap mengacu kepada suatu wawasan yang lebih luas.

Konsep tata ruang ini, menurut Foley⁴ tidak hanya menyangkut suatu wawasan yang disebut sebagai wawasan spatial, tetapi menyangkut pula wawasan nonspatial atau spatial. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa struktur fisik sangat ditentukan dan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor nonfisik seperti organisasi fungsional, pola sosial budaya, dan nilai kehidupan komunitas.⁵

²Amos Rappaport, *Human Aspect in Urban Form-Towards a Man - Environment Approach to Urban Form and Design*. (Oxford: Pergamon International Library of Science, Technology, Engineering and Social Science, 1980).

³W. Wetzling, "Spatial Planning", dalam Ratcliffe, J. *An Introduction to Town and Country Planning*. (London: Hutchinson of London, 1978).

⁴Donald Foley, "An Approach to Metropolitan Spatial Structure", dalam M. Webber, *Exploration Into Urban Structure*. (University of Pennsylvania Press, 1964).

⁵W. Wheaton, "A Comparative Static Analysis of Urban Spatial Structure". *Journal of Economic Theory*. 9. 223-237, 1974. Lihat juga J. Douglas Porteus,

Berdasarkan konsepsi penataan ruang tersebut, maka di dalam Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 disebutkan secara lebih spesifik bahwa penataan ruang adalah suatu upaya untuk mengarahkan pembangunan di kota Banda Aceh dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat. Selain itu, dalam penataan ruang perlu pula diwujudkan keterpaduan antarsektor, daerah, dan masyarakat. Dengan demikian pula bahwa rencana tata ruang wilayah kota Banda Aceh merupakan arahan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan atau dunia usaha.

2. Peran serta/partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan sebuah konsep yang penting di dalam terminologi pembangunan dan sosial budaya. Peran serta masyarakat diidentikkan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi isu penting dalam pembangunan setelah teori atau konsep pembangunan lama ternyata tidak mampu mengangkat harkat dan martabat manusia, khususnya kaum miskin.

Perang Dunia II telah membuat dunia hancur porak poranda. Banyak warga dan negara-negara dunia mengalami kehancuran. Untuk itu, pasca Perang Dunia II upaya mengatasi keterbelakangan dunia ketiga ditempuh dengan mengejar pertumbuhan ekonomi karena diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika paradigma pembangunan kala itu didominasi oleh pemikiran pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mengejar ketertinggalan.

Dalam paradigma ini diyakini bahwa pertumbuhan merupakan ukuran utama

Environment and Behavior-Planning and Everyday Urban Life. (Reading Addison Wesley Publishers Company, 1981).

keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan akan dapat pula dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah, baik dengan sendiri maupun dengan campur pemerintah. Beberapa kalangan berpendapat bahwa ketimpangan pembangunan, apabila hal itu terjadi adalah merupakan situasi yang tidak terelakkan dan justru keadaan itu yang akan terus memacu pertumbuhan itu sendiri. Namun, hipotesis *trickle down effect* yang melekat pada growth paradigm itu dan diharapkan otomatis menyertai pertumbuhan ternyata tidak terwujud. Bahkan yang terjadi sebaliknya, di banyak negara berkembang telah terjadi kesenjangan yang melebar antara kaum *the have* dengan kaum *the poor*.

Melihat kegagalan tersebut, makalah timbullah pemikiran bahwa pertumbuhan tidak cukup dalam mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan. Harus diupayakan terciptanya pertumbuhan yang diiringi oleh pemerataan kesempatan dan pembagian "kue" hasil pembangunan dengan lebih baik dan berkeadilan. Hanya dengan cara demikian, maka mereka yang miskin, tertinggal, dan tidak produktif dapat terangkat dari jurang kemiskinan. Strategi pembangunan yang demikian dikenal antara lain dengan sebutan *redistribution with growth*.

Paradigma pembangunan yang seperti disebutkan itu memberi nuansa baru. Masalah-masalah pembangunan tidak hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut masalah hak asasi manusia, demokrasi, dan sebagainya. Semakin disadari bahwa inti pembangunan itu sendiri adalah manusia. Manusia tidak hanya dapat dijadikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Sebagai subjek pembangunan, manusia mempunyai pilihan terhadap arah, tujuan, dan jalan yang akan ditempuh dalam pembangunan. Pembangunan haruslah meningkatkan secara sepenuhnya keberdayaan dan keikutsertaan (peran serta/partisipasi) masyarakat. Tanpa partisipasi dan peran serta masyarakat, pembangunan hanyalah urusan pemerintah

semata. Masyarakat tidak merasa *handerbeni* terhadap hasil pembangunan. Tidak mengherankan ada pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat, maka masyarakat tidak akan merawat atau menjaga hasil pembangunan tersebut.

Partisipasi merupakan masalah yang sangat penting terutama masukan bagi proses tercapai tujuan tertentu, yang dalam hal ini adalah program pembangunan yang telah ditetapkan. Menurut Mubyarto⁶ (1984: 20) partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan seseorang tanpa mengorbankan kepentingan sendiri. Adapun partisipasi, menurut Tjokroaminoto⁷ (Rahardjo, 1983: 94-95) mempunyai tiga kemungkinan bentuk yang dijabarkan menjadi:

1. Keterlibatan dalam menentukan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang sesuai, dan pengawasan sosial atas jalannya pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

B. Peran Serta Masyarakat

Manusia merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat sangat dinamis. Sejak diciptakan, peradaban dan kebudayaan umat manusia telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kemajuan peradaban dan kebudayaan telah membawa dampak positif dan juga dampak

negatif bagi tata ruang dimana manusia tinggal.

Kedinamisan dari manusia itulah sebuah produk aturan tentang tata ruang harus ditinjau ulang dalam periode tertentu. Pada tahun 2003 pemerintah kota Banda Aceh telah menetapkan sebuah qanun yang mengatur tata ruang wilayah Banda Aceh untuk periode 2002-2010. Namun, qanun baru berusia 5 tahun pemerintah kota telah merancang qanun baru lagi yang diharapkan dapat dipergunakan selama 20 tahun, yaitu untuk periode selama 2007 sampai dengan 2027.

Tentunya, perubahan qanun tersebut bukan tanpa alasan kuat. Perubahan yang dilakukan telah mempertimbangkan prediksi kemajuan dan perkembangan yang akan dialami oleh kota Banda Aceh beserta masyarakatnya. Qanun baru diharapkan mampu mengakomodir dalam menjawab permasalahan, tantangan kota Banda Aceh pada masa 20 tahun ke depan.

Apabila kita perhatikan rancangan perubahan qanun yang baru, maka telah ada semangat untuk melakukan perubahan atas qanun yang lama. Hal ini tampak dari tabel di bawah yang melihat perubahan-perubahan yang ada.

Qanun Kota Banda No. 3 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kota Banda Aceh tahun 2002-2010	Rancangan Qanun Kota Banda Aceh No... tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027
Isi: terdiri dari 15 bab dan 60 pasal	Isi: terdiri dari 17 bab dan 79 pasal
Bahasan: mencakup 15 masalah, yaitu: ketentuan umum; azas, tujuan, sasaran, dan fungsi; ruang lingkup RTRW kota; Pengembangan dan pemanfaatan ruang; pengembangan prasarana kota; intensitas pemanfaatan ruang; pengalihan lahan; peran serta masyarakat; pengawasan dan pengendalian; larangan; ketentuan pidana;	Bahasan: mencakup 17 masalah yaitu: ketentuan umum; Azas tujuan, sasaran, dan fungsi; Ruang lingkup RTRW kota; Arah dan kebijakan pemanfaatan ruang; Hirarki fungsi pelayanan kota; rencana pemanfaatan ruang; Pengembangan Prasarana kota; Intensitas pemanfaatan ruang; hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; kewajiban

ketentuan penyidikan; ketentuan-ketentuan lain; ketentuan penutup	pemerintah kota; peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah; pengawasan dan pengendalian; larangan; ketentuan pidana; ketentuan penyidikan; ketentuan lain-lain; dan ketentuan penutup.
Bahasan tentang peran serta masyarakat: terdapat pada bab 8 pasal 46, pasal 47, dan pasal 48.	Bahasan tentang peran serta masyarakat: terdapat pada bab 9 pasal 61, pasal 62, pasal 63, dan pasal 64.
Subtansi peran serta masyarakat: Tidak ada pembahasan hak, kewajiban masyarakat dalam penataan tata ruang, misalnya tentang masalah penggantian yang layak terhadap kerugian, akses terhadap tata ruang, dll.	Subtansi peran serta masyarakat: ada pembahasan hak, kewajiban masyarakat dalam penataan tata ruang, misalnya tentang masalah penggantian yang layak terhadap kerugian, akses terhadap tata ruang, dll.

Dari tabel di atas tampak bahwa telah terjadi perubahan, baik secara substansial bahasan maupun jumlah pasal-pasal/ayat-ayat yang ada antara qanun yang lama dengan qanun yang baru. Pada subbahasan tentang peran serta masyarakat tampak bahwa pada rancangan qanun yang baru peran serta masyarakat lebih dijabarkan secara lebih luas. Kalau pada qanun lama (Qanun Kota Banda No. 3 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kota Banda Aceh tahun 2002-2010) peran serta masyarakat dibatasi pada:

1. Peran serta masyarakat yang memiliki kualifikasi representatif saja (Bab VIII Pasal 46 ayat 1).
2. Peran serta masyarakat dilakukan mulai dari proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dan atau revisi rencana tata ruang (Bab VIII pasal 46 ayat 2).

Hal ini sangat berbeda dengan rancangan qanun baru. Pada qanun rancangan baru peran serta masyarakat dimaknai lebih komprehensif. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat menjadi lebih jelas. Peran serta masyarakat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak (Bab IX pasal 61)

- a. Setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang
- b. Setiap orang berhak menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang
- c. Setiap orang berhak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang.
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya.
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.

2. Kewajiban (Bab IX pasal 62)

- a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum.

Peran serta masyarakat (Bab IX pasal 64) dalam pengaturan tata ruang diwujudkan dalam bentuk:

1. Pemerintah kota mendorong peran serta masyarakat yang memiliki kualifikasi representatif dalam kegiatan penataan ruang.
2. Peran serta dilakukan mulai dari proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian dan atau revisi rencana tata ruang.
3. Peran serta masyarakat dimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan kegiatan yang berbentuk seminar, lokakarya, temu rakyat atau kegiatan lain yang sejenis.

⁶Mubyarto. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. (Yogyakarta: P3PK, 1984). hlm. 20.

⁷M. Davam Rahardjo., *Essei-essei Ekonomi Politik*. (Jakarta: LP3ES, 1993). Hlm. 94-95.

Cerita Rakyat

Uroe meuganto, si Polem leupah dua uroe dua malam baroe trouh u Kutaraja nyan. Ji ngieng Kutaraja that seungue hana meukeuteik sue. Saweub hek that bak jak ji-ouh, si Polem jipiyoh bak taman Kutaraja. Meubacut han jiteupeu haba rimueng lam kuta.

Watee ka geupeurebah badan, geuduek bak taman, teuingat teuma jih bak kameng nyang ka geupeungon droe jih troh u kuta. Dari bunoe kameng jih pih cukop riyoh kareuna deuk abeudouk. Meujijok teuk saboh ikat gulee. Kameung nyan pih seunang raya, jirout abeh sampoe ukheu-tangkei gulee nyan. Hana treb leuh nyan, kameng pih teungeut meugrou-grou ateuh tanoh.

"Jak keuh! Seip mangat kameng nyan, ban siat leuh jipajoh gulee langsung reubah, teungeut matee!" kheun Polem seunang jingieng kameng jih reubah bak tanoh oh lheueh geupajoh gulee nyan.

"Sang payah ku ci pajoh cit," kheun Polem sidroe. Teuma meujicok lom saboh ikat gulee nyan langsung jipajoh meuntah-meuntah. Lagee kameng jih, bek lalee le leuh nyan, Polem pih tengeut cit.

Hana treb leuh nyan, meujiteuka teuk rimueng keunan. Rimueng nyan cukop that deuek ka dan kabunoe ka dirawoun-rawoun kuta dijak mita peunajoh, han lom meuteume.

Kon le seunang rimueng watee geukalon palem ngon kameng teungoh mangat that teunget. Di taman Kutaraja nyang keuh jiteumee dua macam peunajoh nyang paleng mangat. Saboh kameng, saboh teuk ureung. "Nyang paleng mangat kupajoh kameng dilee, leuh nyan baroe kutegom ureung,"

pikee rimueng nyan. Haapp...! Sigo teugom, han seumpat jimeulawan, kameng nyan jijeuet bulat-bulat. Tinggai taloe bak takue kameng nyang meusinteu-intue, meugantong-gantong di lua babah rimueng. Jicuba kap taloe nyan, tapi han di teim putoh-putoh. Pue lom jinoe rimueng nyan kameurasa teungeut that. Hana treb teuma meureubah teuk rimueng nyan bak bineh si Polem eh.

Watee jaga si Polem, ngon mata goh lom teubleuet abeh, di ulee pih mantong meuayon-ayon, jitijik raga gulee seureuta ditarek taloe kameng jih. Tan ji thei taloe nyan kon le meukat bak takue kameng tapi ka meukeumat bak babah rimueng. Meujihue teuk keudeih u peukan.

Leuh nyan teuma, Polem jitamong lam Kutaraja nyan, jimita pat na peukan, ji nak publoe gulee ngon kameng. Rimueng nyan pih lam teungeut-jaga, jikot ho nyang dihue le si Polem.

Bak teungoh jalan, mandum ureung lam Kutaraja nyan dingieng dari babah pinto rumoh, si Polem teungoh dihue rimueng. Hana treb leuh nyan, di ureung ramee teubiet u lua rumoh sira disurak riyoh "Bak budik keuh! Hayeu that jih! Rimueng ka keumah jidroep. Rimueng ka jidroep! Hai ka ba laju keudeih u istana raja!"

Si Polem hana jadeih dijak u peukan Kutaraja. Jiikot mantong pakat ureung sinan jak u istana raja. Mandum ureung sinan peuhayeu buet si Polem. Mandum ureung lam Kutaraja seunang raya.

Oh lheueh nyan teuma paneuk caritra, si Polem pih geupeukawen dengon putroe raja nyang canden rupa.

Ban lheueh khauri raya di istana, baroe teuhah pikeeran Polem, baroe sadar jih, "Oh., nyoe keuh guna manfaat gulee yang geupeugah le ayah Ion jameun!" [ehz]

Cerita Rakyat

Disadur dari Buku Cerita Rakyat Aceh, ditulis ulang oleh Azhari dan Agus Nur Amal yang berjudul Manusia Bersarung Kodok, terbitan Komunitas Tikar Pandan, Banda Aceh, 2006.